E-ISSN 2962-4665

Published by :
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

JURNAL STUDI ILMU POLITIK

http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JSIPOL

JURNAL STUDI ILMU POLITIK

VOLUME 3, (ISSUE 3, JULY 2024)

JURNAL STUDI ILMU POLITIK

DINAMIKA TOLERANSI BERAGAMA MENJELANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024 ANALISIS ISI TERHADAP BERITA POLITIK (STUDI PADA PORTAL MEDIA BERITA ONLINE KOMPAS.COM)
Reza Aulia, Taufik Akhyar, Najmi Muhammad Fadli, 127 - 136

POPULISME TEKNOKRATIS HARNOJOYO DALAM MEMBANGUN KOTA PALEMBANG
Pratama Primandani Gumay, Izomiddin, Raegen Harahap, 137 - 143

INTERNALISASI NILAI-NILAI POLITIK KEBANGSAAN DAN PENANAMAN IDEOLOGI
Abdullah, Taufik Akhyar , Mayang Sari, 144 - 155

PERUBAHAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL PASCA- BREXIT, DENGAN STUDI KASUS BRITANIA DAN UNI EROPA.
Aldi Adi Pratama, Muhammad Renaldi Saputra, Zacky Naoval Nainggolan, 156 -164

PEMIKIRAN DAN GERAKAN POLITIK MARIA WALANDA MARAMIS DALAM MEMPERJUANGKAN HAK PEREMPUAN DI SULAWESI UTARA TAHUN 1890-1924
Dewi Ria Komala Sari, Taufiq Akhyar, Norma Juainah, 165- 179

VOLUME 3 | ISSUE 3 | PAGE 126 - 179 | JULY 2024

PUBLISH BY :

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL),
Vol. 3 Issue.3 No.1, July 31, 2024(127- 136)
E-ISSN : 29624665

DINAMIKA TOLERANSI BERAGAMA MENJELANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024 ANALISIS ISI TERHADAP BERITA POLITIK (STUDI PADA PORTAL MEDIA BERITA ONLINE KOMPAS.COM)

Reza Aulia[1], Taufik Akhyar[2], Najmi Muhammad Fadli [3]

[123]Ilmu Politik, FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: rezaaulia@gmail.com[1]

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon before the presidential election that the use of religious symbols is prone to occur anywhere and at any time, including in the news, one of the media that covers religious tolerance during the presidential and vice presidential elections is the news media kompas.com. This research aims to determine the dynamics of religious tolerance in the lead up to the 2024 presidential and vice presidential elections on the media portal kompas.com. This research method uses a qualitative approach and is included in the type of library research, primary research data comes from the online media kompas.com, and secondary data. The data collection techniques used are document review or what is usually called documentation, and data analysis techniques, data reduction, data analysis and drawing conclusions. The results obtained were Kompas.com's reporting regarding religious tolerance ahead of the 2024 presidential election with aspects according to Kevin Osborn, namely that acceptance in political news was used as recognition from other people. Respect, in political news as the availability of mutual respect. Then, the aspect of freedom in political news is related to patience, which also leads to a sympathetic attitude towards existing differences. Tolerance in the aspect of patience is a form of availability for other people to be patient with other people's beliefs, morals and philosophies even though they are different. As well as cooperation, in political news it is a form of support or assistance provided by fellow groups with existing differences. Kompas.com's framing of political news using Robert N. Entman's framing theory in this news has described the state of religious tolerance in several regions. The news on religious tolerance also contains several objectives for the figures involved, namely as a campaign medium to attract the attention of the public. Apart from that, the discussion regarding religious tolerance involved several other important figures.

***Keywords**: Religious Tolerance, 2024 Presidential Election, Kompas.com*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan fenomena menjelang pilpres penggunaan simbol agama rentan terjadi dimana saja dan kapan saja termasuk pemberitaan, salah satu media yang meliput tentang toleransi beragama pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden yaitu dari media berita kompas.com. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika toleransi beragama dalam menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 portal media kompas.com. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan masuk kedalam jenis penelitian kepustakaan, data primer penelitian bersumber dari media online kompas.com, dan data sekunder. teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu telaah dokumen atau biasa yang disebut dengan dokumentasi, dan teknik analisis data reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang di peroleh yaitu Pemberitaan Kompas.com mengenai toleransi beragama menjelang pilpres 2024 dengan aspek-aspek

menurut Kevin Osborn yaitu penerimaan dalam berita politik digunakan untuk pengakuan dari orang lain. Penghargaan, dalam berita politik sebagai ketersediaan untuk saling menghargai. Kemudian, aspek kebebasan dalam berita politik berkaitan dengan kesabaran, yang mengarah pula pada sikap simpatik pada perbedaan yang ada. Toleransi dalam aspek kesabaran adalah suatu bentuk ketersediaan orang lain bersabar terhadap keyakinan, moral, dan filosofis orang lain meskipun berbeda. Serta kerjasama, dalam berita politik merupakan bentuk dukungan atau bantuan yang dilakukan oleh sesama kelompok dengan perbedaan yang ada. Pembingkaian berita politik kompas.com dengan teori framing Robert N. Entman dalam berita tersebut telah menggambarkan keadaan toleransi beragama pada beberapa wilayah, dalam berita toleransi beragama tersebut berisi pula beberapa tujuan oleh para tokoh yang terlibat yaitu sebagai media kampanye untuk menarik perhatian khalayak. Selain itu perbincangan mengenai toleransi bergama melibatkan beberapa tokoh penting lainnya.
Kata Kunci: Toleransi Beragama, Pilpres 2024, Kompas.com.

PENDAHULUAN

Paham agama konservatif merupakan aliran keagamaan yang ajarannya diturunkan oleh nabi sebagai pedoman utama tanpa konteks apa pun. Data tersebut tentunya memotivasi calon pemimpin untuk menggunakan simbol dan identitas agama untuk memegang jabatan dengan meraih suara terbanyak (Parmin, 2023). Hubungan antar agama yang telah diwarnai prasangka yang mengganggu kerukunan antaragama karena sering dipengaruhi oleh persepsi subjektif dan multitafsir. Ancaman terhadap toleransi sering kali juga muncul dari perilaku pemeluk agama fundamentalis yang beragama dengan wawasan sempit bahkan juga menengarai intoleransi seperti pada berkembangnya antar agama, namun juga dapat terjadi seperti pada berkembangnya ajaran islam tradisional yang eksklusif, toleran, dan sudah lebih lama berkembang di Indonesia.

Apa lagi dalam menjelang pilpres penggunaan simbol agama rentan terjadi dimana saja dan kapan saja maka dari itu persoalan ini seolah menjadi benang kusut yang sulit untuk diuraikan banyak yang melibatkan pihak-pihak lainnya seperti peserta pemilu yang berambisi untuk menang dengan segala cara, tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang “suka” terseret dalam arus politik yang memenangkan kontestan politik tertentu (Anggraeni, 2021). Agama juga akan menjadi komoditas politik yang diperdagangkan untuk kepentingan kekuasaan. Akibatnya, konflik ini dan perseteruan rentan terjadi, utamanya antar peserta pemilu (Dinda Afrianti. 2023).

Pemerintah melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 tentang larangan dalam kampanye huruf : (c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan peserta pemilu yang lain, (d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Simbol-simbol agama, tokoh agama, dan kegiatan keagamaan tidak jarang

dijadikan alat untuk memuluskan hasrat politik seseoranf atau kelompok tertentu (Rizania et al., 2021).

Apalagi dengan pesatnya perkembangan kemajuan teknologi, masyarakat tidak lagi jauh dari apa yang disebut dengan jejaring sosial. Segala informasi dan interaksi berlangsung secara online melalui banyak platform digital, namun terkait politisasi cerita keagamaan, menurut penelitian yang dilakukan di dua platform digital, Instagram youtube pada periode 2009-2019, cerita keagamaan didominasi oleh konservatisme agama 67,2%, moderat 22,2%, dan 6,1%..liberalisme, 4,5% dan Islamisme (Tatas, 2022).

Adapun pelaku dalam politik media, ialah politisi, jurnalis, dan orang-orang yang digerakkan oleh dorongan kepentingan khusus. Pertama bagi politisi, tujuan dari politik media merupakan dapat menggunakan komunitas massa untuk memobilisasi dukungan publik yang mereka perlukan untuk memenangkan pemilihan umum dan memainkan program mereka ketika duduk di ruangan kerja. Kedua bagi jurnalis, tujuan politik media merupakan untuk membuat tulisan yang menarik perhatian orang dan menekankan apa yang yang disebutnya dengan "suara yang independen dan signifikan dari para jurnalis". Ketiga bagi masyarakat, tujuannya ialah untuk keperluan mengawasi politik dan menjaga politisi agar tetap akun tabel, dengan menggunakan basis usaha yang minimal (Muhanmad, 2023).

Salah satu media yang meliput tentang toleransi beragama pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden yaitu dari media berita kompas.com sejak Juni 2023 sampai Januari 2024 terdapat 5 artikel berita yang membahas tentang toleransi beragama menejelang 2024. Kelima berita tersebut digunakan dalam penelitian ini karena memiliki kriteria yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu membahas mengenai toleransi beragama dan mengaitkan anatara pilpres tahun 2024. Terdapat 6 agama yang terlibat dalam kegiatan toleransi beragama sehingga dari hal tersebut tokoh agama dapat memberikan pengaruh bagi masyarakat untuk menjalankan toleransi beragama (Fadilah, 2022).

Flatform media sosial Kompas.com, telah melakukan survei mengenai toleransi Masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai toleransi dan dengan hasil keseluruhannnya menyatakan bahwa masih ada 53,5 % di anggap mengkwatirkan yang artinya masih banyak Masyarakat intoleransi dalam beragama. Mengenai isu agama pada saat menjelang kontestasi politik tahun 2024, yaitu hasil sebuah survey Litbang Kompas yang telah digelar pada tanggal 8 sampai 10 November 2023, dengan melibatkan sebanyak 512 responden yang berasal dari 34 provinsi Indonesia dan mendapatkan hasil sebanyak 77,8% responden memiliki kekhawatiran terhadap hilangnya toleransi pada Pilpre 2024. Dengan

total rincian hasil toleransi pada pilpres mendatang 53,5% responden khawatir dan 24,3% responden merasa sangat khawatir (Syakirun, 2023).

Selain itu, Kompas.com juga merangkum hasil survei Litbang pada sikap toleransi masyarakat yang tinggi namun tetap dibayangi oleh ancaman konflik agama dan politik, dengan hasil sebanyak 62,2% responden masih menujung tinggi toleransi dan sebanyak 10,4% responden mmberikan pernyataan masih sangat toleran. Nilai toleransi tersebut pada masyarakat berusia dibawah 40 tahun mencapai sebanyak 74%, dan angka ini cenderung lebih tinggi dari masyarakat dengan usia 40 tahun ke atas dengan selisih diangka 4%. Hasil survei ini terlihat semakin tinggi pada responden dnegan usia kurang dari 24 tahu mencapai angka sebanyak 78%, dengan adanya temuan ini menunjukkan hasil toleransi dapat ditanamkan pada generasi muda (Gatra, 2022).

Portal media kompas.com mengungkapkan dua persoalan mengenai batu sandung dalam upaya untuk menjaga nilai toeransi beragama, yaitu: Pertama, persoalan mengenai isu toleransi beragama dengan angka sebanyak 47,6% responden menilai sikap tenggang rasa dan toleransi dalam beragama perlu ditingkatkan. Kedua, ekspresi politik menjadi pekerjaan rumah, dengan hasil sebanyak sepertiga responden menilai toleransi antar pendukung politik cenderung mengganggu ikatan kebangsaan. Persoalan ini tidak terlepas dari fenomena pilpres 2019 lalu yang menyebabkan masyarakat terbelah dan meruncing, hingga saat ini masih terdapat ujaran “kadrun” dan “cebong (Santosa, 2022).

Berkaitan dengan pemilihan presiden, kompas.com telah merangkum sebuah topik berita mengenai Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, yaitu Muhaimin Iskandar, yang menyuarakan bahwa Anies Baswedan telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang menjaga toleransi beragama selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya mengenai calon Presiden yang didukung oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo), yaitu Ganjar Pranowo dari nomor urut 3 melakukan silahturahmi kepada para ulama dan toko masyarakat di Kota Kupang, NTT, dan dalam pertemuan ini Ganjar memberikan penekanan mengenai pentingnya toleransi beragama. Berita tersebut pula menggiring sebuah opini bahwa Anies dianggap sebagai kelompok islam garis keras, dan anti toleransi (Nugraheny, 2023).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe *library research* yaitu dengan data yang bersumber dari buku, jurnal, dan berita yang berkaitan dengan

permasalahan toleransi beragama menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 analisis isi terhadap berita politik studi pada portal media berita online kompas.com. Penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder, data primer merupakan data yang didapatkan peneliti dari pemberitaan toleransi beragama menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 dalam portal media berita online kompas.com (Tobroni. dan Imam Suprayoga, 2001). Data sekunder meruapakan data tambahan yang bersumber dari jurnal, buku-buku, internert, kamus dan lainnya yang digunakan peneliti untuk memperkuat atau sebagai acuan penelitian yang berhubungan dengan toleransi beragama menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan.dengan metode tersebut, teknik pengumpulan data adalah dengan membaca literature primer dan sekunder. Data yang ditemukan berupa pemberitaan mengenai toleransi beragama menjelang pilpres 2024 dalam portal media berita online kompas.com. Teknik analisis data ialah proses menyusun dan mencari secara sistematis data yang telah diperoleh.analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola.memilih mana yang penting dan dipelajari ,membuat keseimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dengan kata lain bahwa analista adalah suatu proses. Adapun alur yang digunakan dalam menganalisis data, adalah: Reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan (Milles, 2014).

HASIL DAN DISKUSI

Menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden akan selalu diwarnai dengan isu toleransi beragama, media berlomba-lomba mengangkat pemberitaan mengenai toleransi beragama yang menghubungkan dengan politik atau demokrasi. Toleransi beragama dapat dijadikan sebagai sebuah tingkah laku yang memberikan pengaruh pada golongan lain, secara timbal balik untuk saling menghormati, yang dapat menjadi mempersatu bahkan perpecahan. Berikut ini terdapat beberapa hasil pemberitaan dari kompas.com yang mengangkat mengenai toleransi beragama menjelang pilpres 2024, yaitu:

Pertama, Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cak Imin Sebut Anies Telah Buktikan Jadi Pemimpin yang Jaga Toleransi Beragama". Didalamnya berita ini melibatkan pernyataan dari Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang memberikan apresiasi terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam menjaga toleransi beragama selama memimpin. Analisis terhadap berita ini dapat

dilakukan dengan menggunakan empat aspek toleransi menurut Kevin Osborn, yaitu penerimaan, penghargaan, kebebasan, dan kerjasama. Pernyataan Cak Imin menyoroti bahwa Anies Baswedan telah membuktikan diri sebagai pemimpin yang menjaga toleransi beragama, hal ini mencerminkan aspek penerimaan terhadap keberagaman agama di Jakarta. Penyebutan izin pembangunan gereja dan vihara oleh Anies dianggap sebagai tindakan penerimaan terhadap kebutuhan beribadah masyarakat Kristen dan Budha. Cak Imin memberikan apresiasi terhadap Anies dengan menyebutkan bahwa pembangunan gereja terbanyak terjadi selama masa kepemimpinan Anies, menunjukkan penghargaan terhadap kebutuhan dan hak beribadah masyarakat Kristen. Penghargaan juga ditunjukkan terhadap kelestarian budaya Tionghoa di kawasan Glodok, dengan menyebutkan dukungan untuk pasar tradisional Petak Sembilan.

Secara keseluruhan, berita ini mencerminkan narasi positif terkait dengan aspek-aspek toleransi, baik dalam konteks kebebasan beragama maupun kerjasama antaragama. Pernyataan Cak Imin dan penekanan pada tindakan konkrit Anies dalam mendukung keberagaman agama mendukung pembentukan citra positif terkait toleransi di Jakarta. Berdasarkan pada hasil analisis tersebut, dinamika politik yang terdapat dalam pemberitaan di atas adalah adanya perilaku politik yang dilakukan oleh Cak Imin untuk merubah pola pikir masyarakat mengenai keberagaman agama di Indonesia. Perilaku yang tersebut berupa penegasan sikap yang dilakukan oleh Anies Baswedan sebagai salah satu calon presiden yang pernah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dengan hasil kinerja yang memberikan fasilitas pembangunan tempat ibadah bagi agama lain, selain agama islam. Hal ini dilakukan oleh Cak Imin untuk mempengaruhi perilaku politik masyarakat untuk memilih Anies sebagai presiden, dan merubah pola pikir masyarakat terhadap Anies Baswedan.

Kedua, Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menurut Gus Yahya, Salah Satu Kriteria Wajib Capres adalah Menjaga Harmoni dan Toleransi. Berita ini berfokus pada pernyataan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), mengenai kriteria wajib calon presiden RI dalam Pilpres 2024. Gus Yahya menyoroti lima kriteria tersebut, yaitu cerdas, bijaksana, takut kepada Tuhannya, mengasihani rakyatnya, dan menjaga harmoni serta toleransi. Analisis dapat dilakukan dengan menggunakan aspek-aspek toleransi menurut Kevin Osborn, yaitu penerimaan, penghargaan, kebebasan, dan kerjasama. Gus Yahya menekankan bahwa salah satu kriteria calon presiden adalah takut kepada Tuhannya. Ini mencerminkan aspek penerimaan terhadap keberagaman keyakinan agama dan pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam kepemimpinan. Referensi Gus Yahya terhadap

warisan luhur Majapahit, khususnya Bhinneka Tunggal Ika, mencerminkan penerimaan terhadap perbedaan dan pluralitas sebagai bagian integral dari sejarah dan identitas Indonesia.

Pernyataan Gus Yahya tentang kriteria mengasihani rakyatnya menunjukkan penghargaan terhadap kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat sebagai aspek penting dalam kepemimpinan. Gus Yahya menyebut bahwa kerajaan Majapahit lebih menghargai perbedaan dan tidak mempersoalkan identitas agama dalam seleksi kepemimpinan, mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman dalam konteks sejarah. Gus Yahya menyebutkan bahwa Pilpres hanya merupakan prosedur pencarian calon presiden, dan mengingatkan agar tidak ada konflik atau persaingan yang berlebihan selama Pilpres. Ini mencerminkan kebebasan dalam proses demokrasi tanpa kekerasan atau pertarungan yang berlebihan. Referensi Gus Yahya terhadap nilai-nilai luhur agama yang mencakup harmoni, merdeka, damai, dan keadilan sosial mencerminkan aspirasi kebebasan dalam beragama dan berkumpul tanpa rasa takut.

Ketiga, Berita ini menggambarkan pembukaan program kampanye "Safari Natal Amin" oleh calon presiden nomor urut 1, Anies R Baswedan, dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Analisis dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek toleransi menurut Kevin Osborn, yaitu penerimaan, penghargaan, kebebasan, dan kerjasama. Anies memulai program kampanye dengan memukul kentongan, menandai dimulainya Safari Natal Amin. Ini mencerminkan sikap penerimaan terhadap perayaan keagamaan dan keberagaman di Indonesia. Gus Yahya mengingatkan bahwa pilpres hanya prosedur dan tidak seharusnya menjadi konflik, menunjukkan penerimaan terhadap proses demokrasi. Acara pembukaan Safari Natal Amin diisi dengan dialog dan makan malam bersama umat Kristiani. Ini mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman agama dan upaya untuk memahami serta mendukung setiap kelompok agama. Safari Natal Amin diisi dengan kegiatan yang melibatkan tokoh agama dari berbagai kelompok, menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan dan semangat Natal sebagai wujud cinta kasih. Dinamika politik akan terus muncul untuk menuntut adanya perubahan kepada individu ataupun kelompok tertentu, pada pemberitaan ini dinamika politik yang dilakukan oleh capres Anies-Muhaimin adalah untuk mempengaruhi kelompok masyarakat dengan kelompok agama tertentu.

Keempat, Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gibran: Kerukunan Warga Singkawang Jadi Inspirasi Jaga Keragaman dan Toleransi" yang membahas kunjungan calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka, ke Kota Singkawang, Kalimantan Barat, serta pertemuannya dengan warga dari berbagai etnis dan

agama. Analisis dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek toleransi menurut Kevin Osborn, yaitu penerimaan, penghargaan, kebebasan, dan kerjasama. Gibran menyatakan kagum terhadap kerukunan warga Singkawang dan menyebutnya sebagai inspirasi untuk menjaga keragaman dan toleransi. Ini mencerminkan sikap penerimaan terhadap keberagaman masyarakat Singkawang dan menghargai upaya menjaga kerukunan di tengah perbedaan. Kunjungan Gibran ke berbagai etnis dan agama menunjukkan upaya untuk menerima dan memahami diversitas budaya dan agama di Singkawang. Gibran menyampaikan terima kasih karena dapat bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh masyarakat Kota Singkawang. Ini mencerminkan penghargaan terhadap peran dan kontribusi berbagai kelompok masyarakat dalam menjaga harmoni dan kerukunan. Perhatian Gibran terhadap para pelaku UMKM di Singkawang, dan usahanya memberikan dukungan melalui inkubasi, mencerminkan penghargaan terhadap potensi ekonomi daerah dan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kelima, Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bhante Pannavaro Mahathera dan Ganjar Pranowo Bicara soal Toleransi di Magelang", yang berisi mencakup kunjungan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah saat itu, ke Magelang untuk berpamitan kepada sejumlah tokoh agama, termasuk Bhante Pannavaro Mahathera, Pemimpin Vihara Mendut. Analisis dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek toleransi menurut Kevin Osborn, yaitu penerimaan, penghargaan, kebebasan, dan kerjasama. Ganjar Pranowo melakukan kunjungan pamitan sebagai Gubernur Jawa Tengah ke Bhante Pannavaro Mahathera, menunjukkan sikap penerimaan terhadap peran tokoh agama dalam masyarakat. Bhante Pannavaro Mahathera menyambut Ganjar dengan sangat hangat dan menganggapnya seperti keluarga, mencerminkan penerimaan dan integrasi tokoh agama dengan tokoh pemerintahan. Ganjar menyampaikan apresiasi dan rasa senangnya atas penerimaan hangat Bhante Pannavaro Mahathera. Ia menekankan bahwa Bhante Pannavaro Mahathera memberikan warna bagi Jateng dan mengajarkan nilai-nilai toleransi. Bhante Pannavaro Mahathera memberikan hadiah berupa buku karangannya kepada Ganjar, menunjukkan penghargaan terhadap pemimpin daerah dan upaya untuk berbagi pengetahuan tentang toleransi dan perbedaan.

Secara keseluruhan, kunjungan Ganjar Pranowo ke Bhante Pannavaro Mahathera menyoroti nilai-nilai toleransi, penerimaan, penghargaan, kebebasan, dan kerjasama antara pemimpin pemerintahan dan tokoh agama dalam konteks budaya dan keagamaan di Magelang.

Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dinamika toleransi beragama dalam berita politik merupakan suatu sikap maupun tindakan tertentu yang memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk memiliki kebebasan masing-masing dan tetap mengakui perbedaan tersebut, namun tidak berujung pada perpecahan. Kebebasan tersebut dapat diartikan sebagai kemampuan diri yang dimiliki untuk mengekspresikan diri berdasarkan pada pandangan serta keinginan dalam diri yang mencakup artian luas. Pada pembertitaan yang terdapat dalam Kompas.com dinamika toleransi beragama menjelang pilpres lebih mengarah pada tujuan untuk mempengaruhi perubahan pola pikir masyarakat untuk menentukan pilihan.

Dengan aspek-aspek tersebut menurut Kevin Osborn yaitu penerimaan dalam berita politik digunakan untuk pengakuan dari orang lain terhadap suatu golongan yang tidak menghilangkan perbedaan. Penghargaan, dalam berita politik sebagai ketersediaan untuk saling menghargai yang dilandasi dengan berbagai kepercayaan, atau tidak ada pemaksaan didalamnya, pemaksaan tersebut mengarah pada pemaksaan yang dilakukan oleh golongan lain untuk orang lain mengikuti golongannya. Dalam toleransi tidak ada golongan atau orang yang melakukan monopoli terhadap keyakinan, urusan, maupun kepentingan orang lain.

Kemudian, aspek kebebasan dalam berita politik berkaitan dengan kesabaran, yang mengarah pula pada sikap simpatik pada perbedaan yang ada. Toleransi dalam aspek kesabaran adalah suatu bentuk ketersediaan orang lain bersabar terhadap keyakinan, moral, dan filosofis orang lain meskipun berbeda. Serta kerjasama, dalam berita politik merupakan bentuk dukungan atau bantuan yang dilakukan oleh sesama kelompok dengan perbedaan yang ada. Hal ini mengarah pada adanya tindakan untuk berdampingan yang tidak saling menyakiti.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis berita politik yang dilakukan peneliti dengan menggunakan teori toleransi beragama Kevin Osborn. Dinamika toleransi beragama dalam berita politik Kompas.com merupakan suatu sikap maupun tindakan tertentu yang memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk memiliki kebebasan masing-masing dan tetap mengakui perbedaan tersebut, namun tidak berujung pada perpecahan. Kebebasan tersebut dapat diartikan sebagai kemampuan diri yang dimiliki untuk mengekspresikan diri berdasarkan pada pandangan serta keinginan dalam diri yang mencakup artian luas. Pada pembertitaan yang terdapat dalam Kompas.com dinamika toleransi beragama menjelang pilpres lebih mengarah pada tujuan untuk mempengaruhi perubahan pola pikir masyarakat

untuk menentukan pilihan kepada calon presiden dengan menunjung tinggi toleransi begarama.

REKOMENDASI

Dari hasil penelitian di atas, peneliti akan menyampaikan beberapa saran, antara lain: Media online Kompas.com diharapkan agar selalu memberikan atau menyampaikan berita positif mengenai politik Indonesia terutama yang menyangkut mengenai toleransi beragama, agar tidak memancing perpecahan pada masing-masing kelompok atau golongan. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat melakukan analisis lebih mendalam mengenai berita politik di media online.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, Indri. 2021. "Penggunaan Simbol Agama Dalam Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Fadilah, K. Pramono. 2022. "Menelusuri Ideologi Media Tempo.Co Melalui Konstruksi Realitas Berita Amandemen Uud 1945." *Jurnal Jurnalisa* 2(1).

Gatra, Sandro. 2022. "Mewaspadai Politisasi Agama Menjelang 2024." *Kompas.com*, Mei 9.

Milles, Matthew. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Muhanmad, F. 2023. "Firdaus Muhammad Vox Populi Konfigurasi Politik Dan Problem Identitas Menjelang Pemilihan Presiden 2024." *Jurnal Politik* 6(2).

Nugraheny, Dian Erika. 2023. "Cak Imin Sebut Anies Telah Buktikan Jadi Pemimpin Yang Jaga Toleransi Beragama." *Kompas.com*.

Parmin. 2023. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik." *Jurnal Educare* 2(1).

Syakirun, Ni'am. 2023. "Angraeni, Indri. (2021). Penggunaan Simbol Agama Dalam Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Apriliano, Bayu.(2023, 16 Agustus). "Bhante Pannavaro Mahathera dan ." *Kompas.com*.

Tatas, H. L. 2022. "Politik Identitas Di Tahun Politik 2024." *jURNAL Sosial* 1(1).

Tobroni. dan Imam Suprayoga. 2001. *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL),
Vol. 3 Issue.3 No.2, July 31, 2024(137- 143)
E-ISSN : 29624665

Populisme Teknokratis Harnojoyo

dalam Membangun Kota Palembang

Pratama Primandani Gumay[1], Izomiddin[2], Raegen Harahap[3]

[1,2]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Raden Fatah Palembang

[3]Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Correspondence Email: raegen.harahap@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

This research is entitled Populist Politics Harnojoyo (Analysis of Palembang City Development Strategies). The purpose of this study is to see Harnojoyo's populist forms and how Harnojoyo's populist activities in Palembang City. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques with literature study and decommunation. Primary data sources through observations of events regarding Harnojoyo's policies, secondary data sources in the form of books, journals, writings and the results of populist analysis, articles, internet, news. The theory used is populist theory. The results of Harnojoyo's populist political research show that working for the people and power to produce populist programs and at the same time absorb people's aspirations to build Palembang city is seen as still listening to people's aspirations, Harnojoyo's populist is a strategy to win people's hearts.

Keywords : Populis-Technocratic, Harnojoyo. Palembang City

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Politik Populis Harnojoyo (Analisis Strategi Pembangunan Kota Palembang). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bentuk populis Harnojoyo dan bagaimana aktivitas populis Harnojoyo di Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskritif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan dekomuntasi. Sumber Data Primer melalui pengamatan dari peristiwa mengenai kebijakan Harnojoyo, sumber data sekunder berupa buku,jurnal, tulisan dan hasil analisis populis,artikel, internet,berita. Teori yang digunakan teori populis. Populis merupakan sebuah paham yang mengakui sebuah hak-hak rakyat kecil. Hasil penelitian politik populis Harnojoyo menunjukan bahwa berkerja untuk rakyat dan kekuasaan untuk menghasilakan program-program populis dan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat untuk membangun kota Palembang dilihat masih mendengarkan aspirasi rakyat, populis harnojoyo merupakan sebagai strategi untuk memenangi hati masyarakat.

Kata kunci : Populis-Teknokratis, Harnojoyo, Kota Palembang

PENDAHULUAN

Populisme adalah ideologi "tipis" dalam arti masyarakat terbagi menjadi dua polarisasi yaitu homogen dan antagonis yaitu orang baik dan elit. Secara konseptual populis mengarah pada gaya kepemimpinan, populis memiliki arti sebagai suatu konsep politik yang mencerminkan supremasi rakyat dan legitimasi politik. Populis berarti menempatkan rakyat di atas segalanya. Pemahaman ini didasarkan pada gagasan untuk mengutamakan kepentingan rakyat karena populis mendapatkan banyak simpati dari masyarakat. Menurut Richard Hofstadter populis ialah gerakan bertujuan membangun program yang berhubungan dengan masyarakat. (Hofstadter. 1991).

Salah satu tujuan utama seorang pemimpin adalah mempertahankan kekuasaannya. Untuk tetap berkuasa, program populis yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan harus disebarluaskan dan dibagikan. Populis menambah warna baru dalam dinamika politik dan kekuasaan di tingkat lokal. Untuk tetap berkuasa pemimpin daerah harus memiliki program kerakyatan yang baik dan peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Kemampuan para pemimpin populis untuk mempromosikan agenda populis dan mengontrol kesejahteraan merupakan strategi untuk memperkuat kekuasaan mereka. (Haboddin, 2019).

Walikota Palembang Harnojoyo memiliki kharismatik dalam memimpin kota Palembang. Dari segi penampilan dan pembicaraan dinilai mampu mengenal dirinya merupakan suatu figur yang bagus di mata masyarakat selain itu juga Harnojoyo bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Harnojoyo muncul dengan beberapa kebijakannya yang populer dan diangap sebagai revosioner sebagai terobosan melalui program-programnya. Populisme Walikota Palembang Harnojoyo memiliki program yang diterapkan untuk masyarakat, program-program banyak bersentuhan langsung dengan masyarakatnya, program tersebut contohnya gotong royong, gerak subuh berjamaah dan lainnya merupakan program inovatif, walikota Palembang Harnojoyo berusaha untuk mendekati dirinya dengan masyarakat melalui program- programnya. Program ini melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat secara langsung. (Palembang.go.id, 2020).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian politik populis Harnojoyo dalam membangun Kota Palembang), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan konsep penggumpulan data melalui kepustakaan. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan

menggambarkan suatu fenomena sosial yang telah terjadi. Pengumpulan data penelitian kualitatif melalui studi pustaka, analisis literatur seperti buku teks, jurnal, artikel dan website terkait strategi politik Harnojoyo dalam pembangunan perkotaan Palembang. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pengamatan yang dilakukan dengan menganaliis kejadian atau peristiwa mengenai kebijakan Harnojoyo dan peran pembangunan kota Palembang pada kepemimpinan Harnojoyo. Sedangkan, data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan peneliti untuk memperkuat penelitian yang berbentuk buku, jurnal. Tulisan serta hasil analisis yang memiliki hubungan dengan penelitian kebijakan Harnojoyo dan peran pembangunan kota Palembang pada kepemimpinan Harnojoyo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Populisme Harnojoyo

Populis sebagai sebuah ideologi dapat diproyeksikan dengan tiga cara. Pertama, selalu terkait atau ditujukan kepada rakyat. Dalam artian, menitikberatkan pada kelompok masyarakat yang biasanya dilihat oleh para pelaku populis sebagai kelompok yang diwakilinya. Kedua, ide atau program harus membangun hubungan langsung antara orang-orang dan mereka yang berkuasa. Ketiga, harus berisi pernyataan menentang yang mapan atau elite (Seda, 2022). Sebagai strategi politik sendiri, populis fokus pada metode dan alat pemenangan dengan menggunakan kekuasaan atau otoritas. Selain populisme sebagai strategi politik, pemilihan politik, organisasi politik adalah karakteristik populis sebagai strategi politik. Harnojoyo memiliki kharismatik dalam memimpin kota Palembang. Dari segi penampilan dan pembicaraan dinilai mampu mengenal dirinya adalah figur yang bagus dimasyarakat selain itu juga mendengarkan aspirasi masyarakat. Harnojoyo mencul dengan beberapa kebijakannya yang populer dan diangap sebagai revosioner sebagai terobosan melalui program subuh berjamaah.

Berdasarkan Lembaga Survei indonesi (LSI), tingkat popularitas Harnojoyo mencapai 93% orang yang terpopuler, untuk tingkat elektabilitas Harnojoyo mencapai 72%. Selain itu, persepsi kinerja pemerintahan kota Palembang mencapai 75%, pelaksanaan pemerintahan di pemerintahan kota palembang sudah baik hampir rata-rata masyarakat kota Palembang menyukai program Gotong Royong dan Safari Subuh Berjamah program-program yang pro kerakyat (amperanews, 2017).

Bentuk Kebijakan Populis-Teknokratis Harnojoyo

1. Program Gotong Royong

Program gotong royong di Kota Palembang dimulai pada bulan juli 2015 dan masih berlangsung hingga saat ini. Dengan konsep Gotong-royong, Pemerintah Kota Palembang menghemat Rp 500 juta setiap minggu. Terhitung biaya tersebut adalah pengelolaan dan perawatan kebersihan 107 kelurahan. Karena program Gotong-Royong dilaksanakan setiap minggu di 107 titik yang diwakili oleh masing-masing RT. Setiap daerah bekerjasama pada satu titik setiap minggu dan serentak di 107 daerah dan harus ada gotong royong. Ini menghemat biaya anggaran (detiknews, 2017).

Adapun Gotong Royong mengungkapkan rasa kebersamaan dan menciptakan kerukunan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah terus digalakkan oleh mendorong program gotong royong dan menyediakan fasilitas seperti penyediaan tempat sampah yang cukup di setiap tempat. Pemerintah Kota Palembang juga mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat untuk kemajuan masyarakat ini karena kegiatan gotong royong ini merupakan salah satu bentuk merakyatnya masyarakat miskin. (ataranews.com, 2022).

2. Program Gerakan Subuh Berjamaah

Gerakan Subuh Berjamaah di Kota Palembang yang sudah digelar sejak tahun 2014 lalu, kini telah menjadi program selain itu juga yang telah ditetapkan serta di jadikan Peraturan Walikota (Perwali). Dalam pelaksanaannya, Wali Kota Palembang mengundang 107 Ustad untuk memberikan Tausiah di 107 kelurahan Kota Palembang, Pemerintah Kota Palembang mengalokasikan dana khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Palembang untuk memfasilitasi para ustazd yang ada di dalamnya. Pemerintah Kota Palembang terus meningkatkan kegiatan keagamaan baik di internal pemerintahan maupun masyarakat (Liputan6, 2018).

Program shalat subuh berjamaah rutin dilakukan dan selalu menjalin silaturahmi dengan masyarakat. Selain menjalin silaturahmi, shalat subuh berjamaah adalah salah satu upaya pemerintahan kota Palembang mensosialisasikan program hasil, selain shalat subuh berjamaah juga akan ada sedekah subuh yang mana uang hasil sedah akan dikelola Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) Kota Palembang, sedekah subuh akan menggerakan Sebanyak

11.000 aparatur sipil Negara (ASN) di wajibkan sedekah setiap subuh dan membagikan sembako (infopublik, 2022).

Tidak hanya terbatas pada gerakan subuh berjamaah, namun tentunya juga memperhatikan masjid-masjid dan sekitarnya di berbagai kabupaten. dalam kegiatan ini salah satu upaya pemerintah kota Palembang untuk mensosialisasikan dan memperoleh program dan hasil pembangunan kepada masyarakat. Reza Pahlevi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Manusia Kota Palembang, mengatakan, selain sholat subuh berjamaah, juga didukung oleh Gerakan Amal oleh aparatur sipil negara yang mengumpulkan sedekah untuk 2.000 warga ini digunakan untuk menyalurkan bantuan sembako kepada warga sekitar masjid, Setiap masjid di 107 kecamatan disediakan 10 sembako bagi pendapatan yang rendah (ataranews.com, 2022).

3. Sekolah Filial

Pendidikan merupakan suatu hal penting yang diberikan kepada generasi muda agar generasi muda memiliki masa depan yang cerah, pendidikan yang baik juga membawa kemajuan yang baik bagi masyarakat, pemerataan yang lebih baik bagi masyarakat, masih banyak anak putus sekolah, sedangkan pemerintah sedang mempersiapkan program sekolah filial untuk anak jalanan dan anak putus sekolah yang ingin melanjutkan sekolah dan sempat terhenti sekolah.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan sekolah filial bagi anak jalanan yang putus Sekolah di Kota Palembang, antara lain: a. Internal 1) Anak jalanan yang putus sekolah mendapatkan kesempatan bersekolah kembali. 2) Peserta didik mendapat ijazah, raport dan sertifikat keterampilan atau keahlian. 3) Peningkatan pembinaan pada karakter. b. Eksternal 1) Terwujudnya keseimbangan pendidikan di Kota Palembang. 2) Berkurangnya angka anak putus sekolah. 3) Bertambahnya angka pastisipasi pendidikan. 4) Menurunkan tingkat kenakalan remaja dan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak jalanan.

Sekolah filial ini berbasis sekolah negeri di kota Palembang. Sekolah filial ini berpusat di Pusat Kegiatan Belajar (SKB) di Jl. Srijaya, no. 896, Kecamatan Alang-alang Lebar, kemudian sekolah ini bertempat di SD Negeri 238, SMP Negeri 19, SMA Negeri 11 Palembang, dimana kemudian setiap guru sekolah tersebut juga dapat mengajar di sekolah cabang tersebut dan mendapatkan bantuan dari guru honorer dari sekolah di kota palembang.

KESIMPULAN

Pemerintahan Harnojoyo menunjukan bahwa berkerja untuk rakyat dan kekuasaan digunakan untuk menghasilkan program-program populis. Untuk membangun kota Palembang lebi baik lagi, fenomena populis yang terjadi sesuai kondisi pada masyarakat. Populis Harnojoyo sebagai populis revolusioner disini ide kolektif untuk memajukan masyarakat secara umum, melalui program subuh berjamaah tak hanya sebagai program juga memperhatikan masjid-masjid dan mushola dilingkungan sekitar, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat setiap melakukan aktivitas program yang populis.

Harnojoyo menggunakan populis sebagai strategi untuk mendekatkan diri dengan masyarakat melalui program-program yang populis untuk membangun citra baik kepada masyarakat dan meningkat populeritas, juga untuk mempertahankan kekuasaan, dan mampu membuat kebijakan yang pro kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Amperanews. (2017, agustus 21). Retrieved from survei LSI: Elektabilitas Harnojoyo Unggul &,2 Persen dari sarimuda: https://amperanews.com/berita/detail/survei-lsi-elektabilitas-harnojoyo-unggul-72-persen-dari-sarimuda

Ataranews.com, s. (2022, 7 minggu). Retrieved from semsel ataranews.com: https://sumsel.antaranews.com

Detiknews. (2017, 03 selasa). *bolos Gotong royong 35 penjabat palembang dihukum bersihkan jalan*. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-3446666/bolos-gotong-royong-35-pejabat-palembang-dihukum-bersihkan-jalan

Detiknews. (2017, 04 kamis). *Dipuji jikowi, wali kota palembang semangat giatakan gotong-royong*. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-3485969/dipuji-jokowi-wali-kota-palembang-semangat-giatkan-gotong-royong

Haboddin, M. (2019). Populisme Sebagai Bentuk Politik Pertahanan Pemimpin Lokal. *Jurnal Politik Walisongo*.

Haliq, A. I. (2022). politik populisme nurdin abdullah: dari banteng menuju sulse-01. jurnal politik dan governance, 23-24.

Heywood, A. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Dalam B. Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik.*

Hofstadter, Richard. (1991). Populisme: Nostalgia Agraris. In konflik dan konsensus dalam Allen F David dan Harold D. Woodman. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.

Infopublik. (2022, juni jumat). Retrieved from pemkot palembang lanjutkan program subuh berjamaah.

Liputan6. (2018, 12 kamis). *Gerakan subuh berjamaah palembang raih moeslim choice award*. Retrieved from https://www.liputan6.com/regional/read/3808088/gerakan-subuh-berjamaah-palembang-raih-moeslim-choice-award

Seda, A. B. (2022). populisme marianus sae sebagai strategi politik dalam pilkada kabupaten ngada tahn2015.

Sriwijayazona.com. (2021, oktober 11). Retrieved from H. Harnojoyo Saat mendengarkan aspirasi masyarakat, usai Safari Subuh .

Wideazone.com. (2021, 12 10). Retrieved from ISS sorot Kinerja Harnojoyo dan Elektabilitas Cakada 2024.

Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL),
Vol. 3 Issue.3 No.3, July 31, 2024(144- 155)
E-ISSN : 29624665

INTERNALISASI NILAI-NILAI POLITIK KEBANGSAAN DAN PENANAMAN IDEOLOGI

Abdullah[1], Taufik Akhyar [2], Mayang Sari[3]

[1]Universitas TerbukaPalembang

[23]Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Correspondence Email: abdullahut123@gmail.com[1]

ABSTRACT

This research is about the internalization of national political values and the cultivation of ideology towards the regeneration process carried out by the Indonesian Democratic Party of Struggle of OKI Regency to its cadres.This research aims to find out how the internalization of national political values and the cultivation of ideology towards the regeneration process of the Indonesian Democratic Party of Struggle of OKI Regency. The research data was collected through direct interviews with informants, namely PDIP members.This data is processed using data condensation, data presentation, drawing conclusions.The theory used in the research is Herman Giescake's theory in the theory there are 4 definitions of political education including; 1.Bildungwissen 2.Orientierrungwissen 3.Verhaltungsweisen 4.Aktionwissen. The method used is qualitative descriptive .The results of this study show that the cultivation of political values and ideology carried out by the PDIP of OKI Regency is political education by using themes regarding national political values and party ideology, Gotong Royong Movement for Party Independence, and Internal Consolidation and Cadre Debriefing which utilizes the role of presenters to convey national political values and ideology.The influencing factor is the awareness of political party cadres and activeness is very necessary during the internalization of values and ideological cultivation, because the executor of the process is the involvement of cadres. This can affect the success and failure of the regeneration process, and the Commitment of the PDIP Party Management, the existence of commitment will have an influence on the implementation of the internalization of values and the cultivation of ideology in the form of a mutual agreement between party administrators in carrying out one of the party's functions.

Keywords: Political Values, Ideology, regeneration

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai internalisasi nilai politik kebangsaan dan penanaman ideologi terhadap proses kaderisasi yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten OKI kepada kadernya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana internalisasi nilai-nilai politik kebangsaan dan penanaman ideologi terhadap proses kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten OKI. Data penelitian di kumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan yaitu anggota PDIP. Data ini diolah menggunakan Kondensasi Data, penyajian data, menarik kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori Herman Giescak dalam teori terdapat empat pengertian mengenai pendidikan politik diantarannya; 1.Bildungwissen 2.Orientierrungwissen 3.Verhaltungsweisen 4.Aktionwissen, metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelian ini

menunjukan bahwa penanaman nilai politik dan ideologi yang dilakukan PDIP Kabupaten OKI ialah Pendidikan politik dengan menggunakan tema mengenai nilai-nilai politik kebangsaan serta ideologi partai, Gerakan Gotong Royong Kemandirian Partai, dan Konsolidasi Internal dan Pembekalan Kader yang memanfaatkan peran pemateri untuk menyampaikan nilai-nilai politik kebangsaan serta ideologi.Faktor yang mempengaruhi ialah Kesadaran kader partai politik dan keaktifan sangat diperlukan selama masa internalisasi nilai-nilai dan penanaman ideologi, karena pelaksana dari proses tersebut adalah keterlibatan para kader. Hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dari proses kaderisasi, dan Komitmen Pengurus Partai PDIP, adanya komitmen akan memberikan pengaruh pada pelaksanaan internalisasi nilai-nilai dan penanaman ideologi berupa kesepakatan bersama antara pengurus partai dalam menjalankan salah satu fungsi partai.
Kata kunci: Nilai Politik, Ideologi, kaderisasi

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kaderisasi partai politik terbagi menjadi dua jenis yaitu secara formal dan informal. Pengkaderan secara formal mengarah pada tata tertib kurikulum dalam partai politik yang tersusun secara sistematika. Sedangkan, secara informal meliputi pendidikan-pendidikan yang telah ditentukan oleh partai politik, pendidikan meliputi penanaman dan pembentukan karakter sebagai calon kader partai politik yang memiliki kualitas yang tinggi, serta mencakup nilai-nilai dan ideologi (Syahputra, 2020). Salah satu partai politik yang aktif melaksanakan kegiatan kaderisasi adalah partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP).

Partai politik tidak akan pernah luput dari pemberitaan media, salah satu permasalahan yang kerap kali terjadi adalah perpecahan partai politik yang dilatarbelakangi oleh perbedaan kepentingan dari masing-masing anggota atau kader yang memiliki posisi atau jabatan dalam suatu partai politik, misalnya yang terjadi pernah terjadi pada partai Golongan Karya (Golkar) yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu Yorrys Raweyai dan Aburizal Bakrie, selain itu terjadi pula pada beberapa partai lain seperti Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa (Dharmasaputra, 2020).

Fenomena di atas menunjukkan bahwa adanya ketidakpahaman yang baik mengenai ideologi dari partai politik tersebut, ataupun disebabkan karena kurangnya pengoptimalan terhadap nilai-nilai kebangsaan yang berkaitan dengan ideologi secara internal dalam program kaderisasi, sehingga peran utama dari partai politik yang harusnya menjadi wadah bagi kepentingan rakyat dan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap negara justru akan disibukkan dengan masalah internal dari perpecahan partai tersebut, dan akhirnya akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin berkurang.

Namun, tidak semua partai politik di Indonesia mengalami perpecahan salah satunya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai PDIP sebagai salah satu partai

pemenang pemilihan umum pada tahun 2014, dengan ini membuktikan PDIP memiliki masa yang cukup banyak, dan memiliki kader yang yang meluas seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Partai PDIP berideologikan dengan pancasila, yang memperjuangkan cita-cita proklamasi 1945, dengan jalan trisakti sebagai arah dan nafas perjuangannya. Partai PDIP juga menasbihkan diri sebagai rakyat kecil denga slogan "Partai ne wong cilik", agar dapat memiliki kader dengan watak dan memiliki desikasi yang sesuai dengan tujuan partai (Ismail, 2022).

Pada periode 2019-2024 berdasarkan pada hasil data KPU OKI, PDIP telah menguasai kursi legislatif DPRD dengan perolehan suara sebanyak 69.004 dan berhasil menduduki 7 kursi. Dalam proses kaderisasi PDIP Kabupaten OKI, telah ditetapkan berdasarkan pada hasil rapat yang telah diputuskan untuk menetapkan calon anggota. Terdapat beberapa tahapan dalam proses kaderisasi PDIP yaitu: Petama, Penyaringan tahap pertama, merupakan dimana tahapan ini berisi porses seleksi terhadap bakal calon anggota, dengan memgsisi formulir atau tahapn ini merupakan tahapan administrasi. Kedua, Penyaringan tahap kedua, tahap ini berisikan penyaringgan terhadap hasil psikotest, rekam jejak pengabdian, hasil penugasan, penanaman nilai-nilai dan ideologi partai, proses ini akan dilalui oleh seluruh bakal calon anggota dari PDI Perjuangan. Ketiga, Penugasan, pada tahap ini proses seleksi partai terhadap bakal calon anggota legislatif, dan terdapat penugasan yang diberikan sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing yang sesuai dengan tingkatan dan kemampuannya untuk menjadi pemenang dalam pemilu. Keempat, Penetapan, merupakan penetapan nomor urut calon yang akan dilihat berdasarkan pertimbangan calon dalam melaksanakan tugasnya.

Selain itu, pada tanggal 22 Juni 2023 PDIP DPC Kabupaten Ogan Komering Ilir mengirimkan ratusan kader untuk menghadiri acara puncak perayaan Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Abdianto sebagai ketua DPC PDI Perjuangan OKI menyampaikan bahwa hal ini dilakukan sebagai wujud dari semangat perjuangan yang menggelora dalam satu barisan kader PDIP, Abdianto pula menegaskan perayaan Bulan Bung Karno pada tahun 2023 memiliki tema "Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya (Mujianto, 2023).

Keikutsertaan kader PDI Perjuangan DPC OKI melibatkan historis dari pemikiran Bung Karno dalam memperjuangkan serta menyatukan suku bangsa Indonesia dan mempertahankan kedaulatan. Adanya semangat persatuan serta kesatuan yang dimiliki oleh Bung Karno kembali dipertahankan oleh seluruh Kader PDI Perjuangan DPC OKI. Disisi

lain, Febriasnyah Wardana sebagai Sekretaris Kader PDI Perjuangan DPC OKI adalah wujud dari penanaman nilai-nilai gagasan kebangsaan kedalam jiwa serta semangat kader PDIP (Mujianto, 2023).

Dari uraian di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa adanya sasaran atau tujuan yang ingin dicapai yaitu terbinanya kader partai politik yang mewujudkan sikap sesuai dengan ideologi partai sebagai landasan, hingga penerapan nilai-nilai kebangsaan dan rasa cinta tanah air yang tinggi, sehingga dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan memegang amanah dan aspirasi masyarakat jelas terdengar. Untuk dapat mewujudkannya diperlukan suatu usaha dalam sistem rekruitmen kaderisasi dengan pemberian pemahaman terhadap nilai-nilai serta penanaman ideologi yang optimal yang sesuai dengan landasan partai politik bukan pada kepentingan pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, hadirnya anggapan bahwa kader partai politik berfungsi sebagai tulang punggung rakyat dalam artian mampu menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat dan setiap kader partai politik harus mampu dan siap menjalankan kehidupan berdasarkan pada nilai-nilai kebangsaan serta berlandasakan pada ideologi partai politik, sehingga terdapat cerminan sikap yang baik ketika menduduki jabatan pemerintah, dan mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan politik tanpa menciptakan perpecahan. Kader politik memiliki tanggung jawab untuk mentranformasikan ideologi serta mengimplementasikan nilai-nilai untuk masyarakat dan negara.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif jenis deskriptif dengan mendapatkan berbagai informasi dari informan berkaitan dengan “Internalisasi Nilai-Nilai Politik Kebangsaan Dan Penanaman Ideologi (Studi Terhadap Proses Kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Ogan Komering Ilir)”.

Sumber data untuk data primer Sumber data dalam penelitian ini yaitu Muhammad Amin sebagai Kepala Sekretariat PDI Perjuangan DPC OKI, I Nyoman Warsayasa sebagai Bendahara PDI Perjuangan DPC OKI, Febriasyah Wardana ST.Sekretaris PDIP ,Wilindra Wakil ketua bidang Keagamaan PDIP,Herdayati bidang penanggulangan bencana , kesehatan perempuan dan anak,dan Desi Anggraini sebagai anggota PDIP. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari sumber yang sudah ada (Sugiyono, 2018). data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh dari dokumentasi, dan keterangan tertulis tentang program kaderisasi partai politik (Danim, 2022).

Untuk memperoleh data dari penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data merupakan suatu proses secara sistematis informasi dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang akan digabungkan menjadi satu dalam data informasi. Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kemudian dideskripsikan dan diakhiri dengan metode penalaran induktif, yaitu informasi yang diperoleh atau dikumpulkan diambil dan interpretasi yang diperlukan diberikan untuk menarik kesimpulan. Maka dapat ditarik kesimpulan berupa informasi tertentu yang di dapat langsung dari observasi lapangan untuk Internalisasi Nilai-Nilai Politik Kebangsaan Dan Penanaman Ideologi.

HASIL DAN DISKUSI

Internalisasi nilai-nilai politik kebangsaan dan penanaman ideologi sangat penting terhadap keberlangsungan proses kaderisasi salah satu nya pendidikan politik, yang sangat berpengaruh terhadap pemahaman seseorang serta membentuk wawasan lebih dalam mengenai kesadaran politik dan membentuk kepribadian politik yang bersifat positif. Hal ini telah tertuang dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Di sana telah disebutkan bahwa, proses pendidikan politik bertujuan untuk proses pembelajaran dan pemahaman hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik adalah usaha untuk meningkatkan kesadaran ilmu pengetahun bagi masyarakat dalam menjalankan sistem politik dengan baik. Dalam proses kaderisasi partai PDIP Kabupaten OKI melakukan internalisasi nilai-nilai politik kebangsaan dan penanaman ideologi dengan beberapa tahap, yaitu:

Pertama, Pendidikan Politik Internalisasi nilai-nlai politik kebangsaan dan ideologi menjadi patokan dalam keberlangsungan proses kaderisasi, hal ini biasanya di gunakan untuk anggota kader terbaru partai politik dalam pendidikan politik, pelaksaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) yaitu memberikan pendidikan politik kepada anggota dan kader-kader partai politik dengan cara melakukan kegiatan rutin setiap tahunnya dengan sosialisasi memberikan materi-materi, adapun tujuan dari pendidikan politik ialah meningkatkan kualitas anggota dan kader-kader partai.

Partai PDIP dalam melaksanakan pendidikan politik memiliki tiga tahapan yang telah ditetapkan yaitu tahapan kader pratama, tahapan kader madya, dan tahapan pendidikan kader utama. PDIP Kabupaten OKI melakuka pendidikan politik yang dikenal dengan tahapan pendidikan kader pratama. Namun, pendidikan politik memiliki peran penting dalam proses

kaderisasi partai PDIP. Dengan adanya pendidikan politik tersebut, proses kaderisasi partai politik akan menghasilkan kader partai yang memiliki kesadaran akan nilai-nilai yang tertanam dalam ideologi.

Pendidikan politik dan juga pelatihan untuk semua anggota dan kader-kader partai demokrat Indonesia perjuangan (PDIP) Kabupaten OKI yang bertema "Penyegaran Kader Menuju Pemantapan Organisasi" yang menunjukkan pada proses mengembangkan, memperbarui energi dan ide-ide segar, serta agar meningkatnya profesionalisme dan meningkatkan kemampuan anggota. Selain itu "Singsingkan Lengan Baju, Rapatkan Barisan Serta Kawal Dan Amankan Suara Guna Mencapai Hattrick 2024" yang berarti secara keseluruhan mengajarkan semangat, kerja keras, kerja sama,berani melindungi pendapat dan mencapai hasil yang luar biasa. Dalam pelatihan tersebut dilakukan supaya memberikan edukasi dan pemahaman bagi kader-kader PDIP Perjuangan selain itu juga,dengan adanya pendidikan politik .

Peneliti melakukan analisis teori yang dikemukakan oleh Herman Giescake bahwa pendidikan politik yang dilakukan partai demokrasi indonesia perjuangan (PDIP) *bildungwissen* artinya yaitu, bisa mengetahui karakteristik manusia dengan observasi yang dilakukan oleh partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP).

Kegiatan pendidikan politik di partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) ini dilakukan dalam ungkapan diatas mengajarkan agar kita untuk selalu melakukan sikap dan perilaku yang baik sehingga seseorang dapat menilai positif dan berperilaku baik unutk investasi yang bernilai bagi diri sendiri dan kedepannya. Oleh karna itu keberhasilan suatu partai politik sangat berkaitan dengan anggota dan kader yang ada di dalamnya, sehingga pentingnya kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada kader-kader partai politik maupun masyarakat agar mampu bertingkah laku dan berbuat politik secara cermat, benar dan tepat kemudian didukung dengan etika serta menanamkan suatu prinsip tentang kebenaran dan keadilan.

Kegiatan-kegiatan ini di harapkan mampu untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang bagai mana cara saling mengahargai sesama warga negara dan dapat hidup rukun antar sesama warga negara yang tidak memandang ras dan keyakinan. Kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh PDIP kabupaten OKI yaitu tidak hanya memberikan materi melainkan juga dengan mengarahkan langsung masyarakat kepada norma-norma hukum dan juga mengajak masyarakat agar selalu hidup rukun dan saling menghormati walaupun mempunyai perbedaan pendapat.

Orang-orang yang ber manfaat dengan berbagi ilmu kepada sesama masyarakat dengan menunjukan sikap yang baik agar mereka sadar tentang norma-norma hukum yang berlaku di Indonesi. Menurut Herman Giesecake yaitu *Orientierungwissen* yaitu mampu bertingkah laku dan berbuat politik secara cermat, benar dan tepat, dan berdasarkan dengan ketetapan yang telah di buat, kemudian di dukung dengan prinsip tentang kebenaran dan tentang keadilan. Sesuai dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh PDIP dimana partai tersebut memberikan pendidikan politik dengan materi yang telah di susun berdasarkan pancasila dan UUD RI 1945. pada prinsip kebenaran dan keadilan yang dilakukan secara cermat tepat dan benar dengan tujuan mensejahterakhkan masyarakat yang didasarkan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

PDIP kabupaten OKI kepada kadernya jelas tentang pentingnya etika berpolitik bagi semua kader, agar masyarakat dapat menilai baik kepada kader-kader PDIP kabupaten OKI. Hal ini sesuai dengan pendidikan politik yang dikemukakan oleh Hermann Giesecke dalam indikator *Verhaltungwissen,* memahami tata tertib, hukum, dan peraturan. Selain itu pendidikan politik partai PDIP dilakukan untuk para kader memiliki nilai-nilai politik kebangsaan yang baik.

Pendidikan yang dilakukan oleh PDIP Kabupaten OKI untuk dapat menjamin kualitas kader dengan internalisasi nilai serta penanaman idelogi dilibatkan peran guru besar internal partai serta universitas. Jika dianalisis berdasarkan teori pendidikan politk Hermann Giesecke, pendidikan politik yang dilakukan oleh PDIP Kabupaten OKI telah sesuai dengan indikator *Aktionwissen, yaitu* bertingkah laku dengan cermat, tepat, dan benar karena telah didukung oleh prinsip dan nilai-nilai yang berlaku di PDIP.

Dari hasil pendidikan politik yang dilakukan oleh PDIP Kbupaten OKI dalam internalisasi serta penanaman idelogi, tentu terdapat kriteria yang harus dimiliki oleh kader partai yang sesuai dengan nilai-nilai dan ideologi. Pendidikan politik dengan internalisasi nilai-nilai dan penanaman idelogi dilakukan agar mendapatkan kader yang berkualitas dengan kriteria yang terbentuk dari nilai-nilai tersebut. Hal ini sesuai dengan pendidikan politik yang dikemukakan oleh Hermann Giesecke dalam indikator *Orientierungwissen,* yaitu kriteria yang berorientasi pada sebuah nilai-nilai, dalam pendidikan politik merupakan nilai-nilai politik kebangsaan.

Kedua, Konsep gotong royong dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan sebuah manifestasi untuk dapat menumbuhkan modalitas sosial, nilai-nilai, dan ideolofi dalam tujuan untuk bersinerginya menuju kebersamaan. Konsep gotong royong

sangat dianggap penting dalam PDIP karena pada zaman pemerintahan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden Indonesia menamakan kabinetnya sebagai kabinet gotong royong, karena Megawati sangat menjunjung tinggi gotong royong sama halnya pada saat pemerintahan Soekarno.

Gotong royong menjadi bagian dari PDIP karena dipercaya akan menumbuhkan nilai-nilai dan melahirkan serta membentuk karakter. Jika gotong royong tidak dilakukan makan akan membentuk kader PDIP yang memiliki sikap apatis atau acuh tak acuh. Konsep gotong royong menurut PDI Perjuangan adalah manifestasi untuk membangun modalitas sosial, modalitas ekonomi, modalitas kebudayaan dan modalitas politik dalam rangka menuju tersinerginya kekuatan untuk mencapai kebersamaan. Gotong-royong sebagai solidaritas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama mereka yang membentuk komunitas-komunitas, karena dalam komunitas seperti ini akan terlihat dengan jelas.

Hubungan antar individu dalam partai tidak hanya akan menimbulkan dampak positif saja, namun juga tidak lepas dari adanya hubungan disosiatif atau interaksi yang dapat berdampak negatif bagi pelakunya, misalnya terjadi konflik ataupun persaingan di dalam partai politik, khususnya pada partai politik di DPC PDI Perjuangan. Dalam partai politik kegiatan gotong royong tidak hanya dapat menimbulkan interkasi asosiatif saja namun juga interaksi disosiatif. Gotong royong dalam partai politik pun banyak di implementasikan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, dengan melibatkan seluruh kader, hal ini sebagai tujuan para kader PDIP dapat menanamkan serta mencerminkan nilai-nilai.

Banyak hal yang dilakukan di DPC PDI Perjuangan menggunakan konsep gotong royong sebagai bagian dari cara untuk internalisasi nilai-nilai serta penanaman ideologi dalam kegiatan nyata, bukan sekedar materi, karena hampir semua kegiatan disana dilakukan secara bergotong royong. Setiap program maupun kegiatan partai yang dijalankan oleh PDI Perjuangan memang harus relevan dengan kebutuhan masyarakat, karena tujuan utama dari terselenggaranya program kerja tersebut adalah untuk menyentuh kehidupan rakyat demi kesejahteraan. Tentunya tetap dengan menggunakan konsep gotong royong di dalamnya.

Implementasi nilai gotong royong pada masyarakat Indonesia khususnya untuk anggota DPC PDI Perjuangan Kabupaten OKI merupakan bagian esensial dari revitalisasi nilai sosial budaya dan adat istiadat pada masyarakat yang memiliki budaya beragam agar terbebas dari dominasi ideologi yang tidak mensejahterakan. Wujud implementasi dari konsep gotong royong dalam partai ini adalah dalam bentuk kegiatankegiatan partai maupun

program partai, karena kegiatan maupun program partai yang dijalankan merupakan alat untuk menarik hati masyarakat.

Salah satu sumber dari solidaritas adalah gotong royong, istilah gotong royong mengacu pada kegiatan saling menolong atau saling membantu dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa solidaritas merupakan alat pemersatu partai dalam berpolitik. Pola hidup yang seperti ini meruapakan bentuk nyata dari solidaritas mekanik yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat maupun berpolitik. Tradisi kerjasama tersebut tercermin dalam berbagai bidang kegiatan masyarakat diantaranya adalah kegiatan dalam membangun rumah, memperbaiki sarana umum, dalam bencana alam dan lain-lain, terlebih pada partai politik. Di dalam partai politik, membangun solidaritas itu sangat penting demi mempertahankan partai politik tersebut agar tetap berdiri kokoh dengan berisikan para kader yang memiliki jiwa yang dibangun berdasarkan nilai-nilai dan ideologi.

Konsep gotong royong sudah sejak lama diterapkan dalam partai politik PDI Perjuangan, dari jaman Presiden Soekarno hingga sekarang masih tetap terjaga, karena gotong royong merupakan ideologi partai PDI Perjuangan. Tidak hanya itu, di setiap kesempatan dalam kegiatan, selalu melibatkan konsep gotong royong. Maka, PDI Perjuangan berusaha untuk berdaulat di bidang politik apabila di dalam pengelolaan keuangan partai dapat menerapkan prinsip berdikari "berdiri diatas kaki sendiri". Guna mewujudkan kedaulatan partai, serta nilai, dan ideologi yang telah ditanamkan.

Ketiga, Selain dalam pendidikan politik, internalisasi nilai-nilai politik kebangsaan dan penanaman ideologi juga dilakukan oleh PDIP Kabupaten OKI dengan cara mengadakan konsolidasi internal dan pembekalan kader. Dalam konsolidasi internal ini akan dimuat dengan mengangkat berbagai macam tema yang sesuai dengan nilai-nilai politik kebangsaan serta idelogoli PDIP.

Konsolidasi internal telah menjadi agenda rutin yang dilakukan oleh PDIP Kabupaten OKI untuk menjalankan internalisasi nilai-nilai dan penanaman ideolgi yang dilakukan dalam beberapa kecamatan. Dengan adanya pertemuan tersebut dapat menumbuhkan nilai-nilai yang telah ditanamkan seperti nilai kemanusiaan yang merupakan bagian dari nilai-nilai politik kebangsaan. Konsolidasi internal selain berisi rapat dan penanaman idelogi serta internalisasi nilai secara materi, dalam kegiatan ini pula dilakukan secara nyata yaitu dengan menambahkan beberapa kegiatan lain seperti penanaman pohon dan mendirikan rumah gratis.

Internalisasi nilai-nilai politik kebangsaan pada PDIP Kabupaten OKI dilakukan bukan hanya melalui penamaham materi melakinkan dengan melakukan aksi nyata. Seperti

yang telah dilakukan yaitu dengan melakukan penghijauan di beberapa kecamatan dengan menanamkan 1.000 pohon. Selain itu pula mendirikan rumah belajar gratis yang di prakarsai oleh Nyoman Wayan Siti, hal ini dapat dilihat bahwa PDIP Kabupaten OKI telah mencerminkan nilai produktivitas yang mengarah pada perbuatan untuk memenuhi kemakmuran manusia, memberikan sarana bagi masyarakat untuk semakin kreatif dan produktif, selain itu pula mencerminkan nilai kemanusiaan.

Jika dianalisis berdasarkan pada teori Hermann Giesecke dengan 3 indikator yang terdapat dalam pendidikan politik, maka PDIP Kabupaten OKI dalam melakukan internalisasi nilai-nilai dan penanaman ideologi baik itu dalam pendidikan politik, Gerakan Gotong Royong Kemandirian Partai, dan Konsolidasi Internal dan Pembekalan Kader telah sesuai dengan 3 indikator tersebut, yaitu: Pertama, *Bildungwissen,* pada ketiga cara yang dilakukan oleh PDIP Kabupaten OKI dilaukan bertujuan untuk membentuk serta memberikan gambaran pada kader partai unutk dapat membangun dan mengembangkan suatu nilai. Sehingga akan menghasilkan kekuatan pribadi yang sesuai dengan nilai dan ideologi partai. Kedua, *orientierungwissen* PDIP Kabupaten OKI telah melakukan internalisasi nilai dan penanaman ideologi yang bertujuan untuk menjadikan kader partai mampu berorientasi pada sebuah nilai, dan ideologi yang ditanamkan. Ketiga, *Verhaltungwissen* PDIP Kabupaten OKI telah melakukan internalisasi nilai dan penanaman ideologi yang bertujuan memahami tata tertib, hukum, dan peraturan kepada kader. Keempat *aktionwissen* PDIP Kabupaten OKI telah melakukan internalisasi nilai dan penanaman ideologi yang bertujuan untuk mengrahakan kader agar dapat bertingkah laku dengan cermat, tepat, dan benar karena telah didukung oleh prinsip dan nilai-nilai dan ideologi partai.

Manusia mempunyai bakat yang telah terkandung di dalam dirinya untukmengembangkan berbagai macam perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi dalam kepribadian individunya. Akan tetapi, wujud pengaktifan berbagai macam isi kepribadiannya itu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam stimulus yang beradadalam alam sekitarnya dan dalam lingkungan sosial maupun budayanya (Trisno, 2019).

Setiap hari dalam kehidupan individu akan bertambah pengalamannya bermacam-macam perasaan baru, maka belajarlah ia merasakan kebahagiaan,kegembiraan, simpati, cinta, benci, keamanan, harga diri, kebenaran, rasa bersalah, dosa, malu, dan sebagainyaa. Selain perasaan tersebut, berkembang pula berbagaimacam hasrat seperti hasrat mempertahankan hidup.hasrat seperti hasrat mempertahankan hidup.

Proses internalisasi dapat membantu seseorang mendefinisikan siapa dirinya melalui nilai-nilai di dalam dirinya dan dalam masyarakatnya yang sudah tercipta dalam bentuk serangkaian norma dan praktik. Hal ini sama halnya dengan pendapat Marmawi Rais 2012 yang menyatakan bahwa: "Proses internalisasi lazim lebih cepat terwujud melalui keterlibatan peran-peran model (role-models). Individu mendapatkan seseorang yang dapat dihormati dan dijadikan panutan, sehingga dia dapat menerima serangkaian norma yang ditampilkan melalui keteladanan. Proses ini lazim dinamaisebagai identifikasi (identification), baik dalam psikologi maupun sosiologi. Sikap dan perilaku ini terwujud melalui pembelajaran atau asimiliasi yang subsadar (subconscious) dan nir-sadar (unconscious)". (Alfero, Azwar, and Rahmaningsih 2022)

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa proses internalisasi lebih mudah terwujud melalui adanya karakter-karakter panutan (peran model), seseorang akan lebih mudah untuk menginternalisasikan sesuatu melalui peran-peran keteladanan sehingga seseorang itu bisa dengan cepat menerima serangkaian norma yang ditampilkan tersebut. Dalam psikologi, menurut Rais 2012 proses internalisasi merupakan "proses penerimaan serangkaian norma dari orang atau kelompok lain yang berpengaruh pada individu atau yang dinamai internalisasi ini melibatkan beberapa tahapan".

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Internalisasi Nilai-Nilai Politik Kebangsaan Dan Penanaman Ideologi (Studi Terhadap Proses Kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten OKI), dan faktor yang mempengaruhi, dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu: PDIP Kabupaten OKI melakukan internalisasi nilai-nilai dan penanaman ideologi pada proses kaderisasi dengan melalui: Pendidikan politik dengan menggunakan tema mengenai nilai-nilai politik kebangsaan serta ideologi partai, Gerakan Gotong Royong Kemandirian Partai, dan Konsolidasi Internal dan Pembekalan Kader yang memanfaatkan peran pemateri untuk menyampaikan nilai-nilai politik kebangsaan serta ideologi.

REKOMENDASI

Dari hasil penelitian di atas, peneliti akan menyampaikan beberapa saran, antara lain: Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu: kepada PDIP Kabupaten OKI kedepannya diharapkan untuk dapat lebih

memaksimalkan lagi internalisasi nilai-nilai politik kebangsaan dan penanaman ideologi pada proses kaderisasi, dengan tujuan melahirkan kader baru dengan cerminan sikap, serta karakteristik yang sesuai dengan nilai dan ideologi partai. Kepada peneliti selanjutnya untuk dapat lebih baik dalam melakukan penelitian mengenai internalisasi nilai-nilai dan penanaman ideologi, teruama pada partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

Alfero, Raga Kova, Beni Azwar, and Sri Rahmaningsih. 2022. "Internalisasi Nilai-Nilai Dalam Pembelajaran Pai Di Smpn 01 Ujan Mas."

Danim. 2022. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodelogi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Dharmasaputra, Sutta. 2020. "Gerak Partai Beringin Saat Badai Menerpa." *Kompas.id*, Agustus 21.

Fauziah. 2021. "Strategi Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik: Studi Strategi Rekrutmen dan Kaderisasi DPW PKB DIY melalui Gemasaba DIY." Universitas Gajah Mada.

Kompas.Id, August.

Fales, Suimi. 2018. "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3(2):199–210.

Ismail, Hasan. 2022. "Implementasi Kaderisasi DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Timur." *Jurnal Untag* 1(1).

Mujianto. 2023. "Ratusan Kader PDIP OKI Merahkan GBK, Ini Tujuannya." *Palpre.com*, Juni.

Sugiyono. 2018. *Metde Penelitian Kuantitatfi, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syahputra, Muhammad Rizky. 2020. "Fungsi Kaderisasi dalam Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan." *journal of education and teaching Learning* 2(3):22.

Trisno, Bambang. 2019. "Internalisasi Budaya Politik Santun Kepada Generasi Muda." *Menara Ekonomi* V(1):1–8.

Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL),
Vol. 3 Issue.3 No.4, July 31, 2024(156- 164)
E-ISSN : 29624665

PERUBAHAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL PASCA-BREXIT, DENGAN STUDI KASUS BRITANIA DAN UNI EROPA.

Aldi Adi Pratama[1], Muhammad Renaldi Saputra[2], Zacky Naoval Nainggolan[3]

[123]Institut Pertanian Bogor

Correspondence E-mail : aldiadipratama20839aldi@apps.ipb.ac.id

ABSTRACT

In the European region, namely the United Kingdom, since 2016, discourse on the Brexit policy has emerged. This policy includes the United Kingdom's exit from the European Union (EU). This plan is due to financial contributions, namely that the United Kingdom is one of the largest contributors to the European Union budget. The official exit of the United Kingdom from the European Union on January 31 2020 at 11 pm GMT resulted in changes in economic flows in Europe. The aim of this research is to examine in more depth the research on changes in the dynamics of post-Brexit international trade, with case studies of the United Kingdom and the European Union. The method in this research uses a literature study and literature review approach. Literature study analysis has the advantage of providing a comprehensive review, such as a broad overview but focusing more on aspects of the problem raised from different points of view. The literature study approach is also able to identify research gaps according to trends and developments. The research results reveal that the UK Government's strategy includes implementing seasonal worker visa laws, implementing a points-based immigration system, formulating the 2020 agricultural policy, encouraging local workers and automation. Investment concerns which are part of the trade-economic aspect, from the Brexit policy itself, caused the British economy to experience a decline, making other countries such as Japan worried that their investments in the UK would suffer losses. But on the other hand, there is a positive impact for the UK with the existence of the Single Market.

Keywords: Economy, Europe, England, Investment, Policy, Trade.

ABSTRAK

Di kawasan Eropa, yakni Britania Raya sejak tahun 2016, muncul wacana kebijakan Brexit. Kebijakan ini memuat keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa (UE). Rencana ini disebabkan seperti pada hal Kontribusi Keuangan, yakni Britania Raya adalah salah satu kontributor penyumbang terbesar ke anggaran Uni Eropa. Keluar nya Britania Raya dari Uni Eropa secara resmi pada tanggal 31 Januari 2020 pukul 11 malam GMT mengakibatkan perubahan arus ekonomi di Eropa. Tujuan penelitian ini yakni mengkaji lebih mendalam terhadap penelitian perubahan dinamika perdagangan Internasional Pasca-Brexit, dengan studi kasus Britania Raya dan Uni Eropa. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dan literatur review. Analisis studi pustaka memiliki kelebihan berupa menyediakan tinjauan komprehensif , seperti gambaran yang luas namun lebih berfokus pada aspek masalah yang diangkat dari sudut pandang yang berbeda. Pendekatan studi pustaka juga mampu mengidentifikasi kesenjangan penelitian

sesuai dengan tren dan perkembangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa strategi Pemerintah Inggris Raya turut berupa menerapkan peraturan undang-undang visa pekerja musiman, memberlakukan sistem imigrasi berbasis poin, merumuskan kebijakan agrikultur 2020, mendorong pekerja lokal dan otomatisasi. Kekhawatiran investasi yang merupakan bagian dari aspek perdagangan-ekonomi, dari kebijakan Brexit itu sendiri menyebabkan ekonomi Inggris sempat mengalami penurunan, sehingga membuat negara lain seperti Jepang khawatir terhadap investasinya di Inggris akan mengalami kerugian. Tetapi disisi lain menjadi dampak positif bagi Inggris dengan adanya pasar Tunggal.

Kata Kunci : Ekonomi, Eropa, Inggris, Investasi, Kebijakan, Perdagangan.

PENDAHULUAN

Kebijakan politik pada konsep internal suatu negara, tidak terlepas dari bagaimana posisi negara tersebut ingin meningkatkan kesejahteraan warga. Faktor ini bisa bersifat inisiatif dari pemerintah yang sedang berjalan atau berkuasa, bahkan hingga aspirasi seperti referendum yang lebih dikenal sebagai jajak pendapat. Referendum dilakukan, karena merupakan bagian dari tanggungjawab suatu negara untuk melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan (Hofi & Wicaksono, 2023)**.** Kebijakan politik dalam suatu tatanan negara dan sistem pemerintahan merupakan serangkaian keputusan dari tindakan yang diambil oleh pemerintah maupun dari instansi atau lembaga yang memiliki hak, tugas, dan wewenang untuk mengatur berbagai aspek kehidupan warga dalam suatu negara di wilayah teritorial. Kebijakan politik dapat mencakup berbagai bidang seperti aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan.

Tujuan dari kebijakan politik secara umum dipergunakan untuk mencapai kesejahteraan umum, menjaga ketertiban, dan memastikan keadilan sosial dalam negeri. Bentuk kebijakan politik bisa dikatakan seperti pembuatan undang-undang, peraturan, program, atau inisiatif yang dirancang untuk mengatasi hambatan atau mencapai tujuan khusus. Sistem pengolahan atau pembuatan kebijakan politik biasanya melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, legislator, kelompok kepentingan, dan masyarakat umum. Sebagai contoh dalam cakupan kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal (pemungutan pajak dan pengeluaran belanja pemerintah) dan kebijakan moneter (aspek pengendalian jumlah uang beredar). Perlu diingat bahwasanya kebijakan politik mempunyai kekuatan hukum yang harus ditaati warga negara yang terlibat, dan pihak luar harus menghormati, sebagai bagian dari penghormatan kedaulatan. Namun kebijakan politik dapat

berubah seiring waktu tergantung situasi dinamika politik, perubahan dinamika sosial masyarakat, dan prioritas pemerintah yang berkuasa.

Di kawasan Eropa, yakni Britania Raya sejak tahun 2016, muncul wacana kebijakan Brexit. Kebijakan ini memuat keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa (UE). Rencana ini disebabkan seperti pada hal Kontribusi Keuangan, yakni Britania Raya adalah salah satu kontributor penyumbang terbesar ke anggaran Uni Eropa. Pihak pendukung Brexit memiliki pendapat bahwa anggaran keuangan yang disetorkan ke Uni Eropa, seharusnya lebih baik digunakan untuk kepentingan internal negara. Kepentingan yang dimaksud seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pada aspek Regulasi dan Birokrasi, muncul rasa kekhawatiran bahwa peraturan dan birokrasi dari Uji Eropa sangat membebani manajemen bisnis dan ekonomi Britania Raya.

Pendukung Brexit mempercayai bahwa kebijakan politik ini, dapat menetapkan regulasi sendiri yang lebih sesuai dengan kebutuhan ekonomi negara. Kondisi tersebut sesuai dengan kebudayaan setempat, dibuktikan dengan penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa masyarakat Inggris dengan ideologi liberalisme sangat mengkritisi setiap kebijakan sosial pemerintah (Nurdin, 2023)**.** Kebijakan Brexit membuat aspek perencanaan investasi asing yang ingin melakukan aktivitas perekonomian di kawasan Uni Eropa, cenderung khawatir akan kegiatan bisnisnya. Tidak hanya itu, Pada kondisi internal, ketidakpastian yang terkait dengan Brexit berdampak pada beberapa perusahaan ingin menunda atau mengurangi investasi di Britania Raya.

Kekhawatiran ini pernah muncul karena Jepang merasa akan sangat dirugikan jika Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa, sebab Jepang akan kehilangan pasar tunggal yang selama berinvestasi di Inggris menjadi salah satu keuntungan bagi Jepang. Kekhawatiran investasi yang merupakan bagian dari aspek perdagangan-ekonomi, dari kebijakan Brexit itu sendiri menyebabkan ekonomi Inggris sempat mengalami penurunan, sehingga membuat Jepang khawatir terhadap investasinya di Inggris akan mengalami kerugian. Tetapi disisi lain menjadi dampak positif bagi Inggris dengan adanya pasar tunggal (Sutantri et al., 2021)**.** Aktivitas ini terjadi terutama di sektor keuangan, seperti memindahkan sebagian operasinya ke negara-negara UE untuk mempertahankan akses pasar. Sektor keuangan ini, yang kemudian merambat pada aspek penanganan migrasi terutama bagi pengungsi dan pencari suaka. Oleh sebab itu, peneliti memiliki

tujuan untuk mengkaji lebih mendalam terhadap penelitian perubahan dinamika kebijakan perdagangan Internasional Pasca-Brexit, dengan studi kasus Britania Raya dan Uni Eropa.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dan literatur review. Analisis studi pustaka memiliki kelebihan berupa menyediakan tinjauan komprehensif , seperti gambaran yang luas namun lebih berfokus pada aspek masalah yang diangkat dari sudut pandang yang berbeda. Pendekatan studi pustaka juga mampu mengidentifikasi kesenjangan penelitian sesuai dengan tren dan perkembangan. Diikuti tambahan landasan empiris yang solid dalam mendukung hipotesis pada penelitian baru. Berbeda dengan studi pustaka, menekankan pada fokus sumber-sumber primer, seperti buku, bahkan hingga artikel jurnal yang memberikan data informasi secara spesifik. Dengan bersumber pada akses berbagai media, peneliti memiliki pandangan sudut yang berbeda dalam penelitian. Metode studi pustaka yang dilakukan memuat tahap sebagai berikut :

1. Identifikasi Topik Penelitian

Tahapan ini berupa pelaksanaan identifikasi Brexit, yang kemudian dihubungkan dengan kebijakan penerimaan migrasi seperti para pengungsi atau suaka. Identifikasi secara khusus, mengedepankan perbedaan sebelum dan sesudah keluar nya Britania Raya dari Uni Eropa.

2. Pencarian dan Seleksi Literatur

Tahapan ini memuat pelaksanaan pencarian sumber data mengenai kebijakan Brexit terhadap urusan migrasi. Data yang dipergunakan bersumber dari artikel jurnal, yang memuat kata kunci yang sama. Penelitian ini juga berupaya menghindari sumber berita yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, maka dari itu perlu adanya seleksi dari berbagai data yang dikumpulkan

3. Evaluasi dan Sumber Penelitian

Peneliti kemudian melakukan evaluasi terhadap data yang telah diseleksi, apakah sesuai dengan tujuan penelitian. Evaluasi dikatakan perlu, untuk menciptakan korelasi dan kesinambungan data.

4. Pencatatan dan Pengorganisasian

Tahapan ini berupa langkah penelitian dengan memasukkan data ke dalam sistem pencatatan yang sesuai, baik itu dalam bentuk fisik atau digital. Lebih lanjut digunakan dengan mengelompokkan data berdasarkan kategori atau atribut tertentu untuk mempermudah pencarian dan analisis. Lebih lanjut dipergunakan untuk memudahkan pengambilan kembali informasi dan verifikasi.

5. Analisis Data

Tahapan ini berupa langkah dengan menganalisis dan menginterpretasikan hasil pencatatan dan pengorganisasian data. Langkah ini lebih menjelaskan secara deskriptif terhadap data yang telah dikumpulkan

6. Penulisan dan Pelaporan

Tahapan ini bersamaan dengan analisis data dengan melakukan penulisan deskriptif sesuai dengan fakta yang ada.

Metode Literatur Review pada penelitian ini melalui beberapa tahap, seperti :

1. Identifikasi Tujuan Review

Melakukan identifikasi berdasarkan apa yang harus dicapai, dan kemudian bagaimana kondisi perbedaan dan hambatan yang terjadi saat dilaksanakan Brexit

2. Pencarian dan Seleksi Literatur

Melakukan pengumpulan artikel buku atau jurnal, sesuai dengan topik Brexit, yang kemudian diseleksi berdasarkan korelasi penelitian terdahulu.

3. Evaluasi Kritis

Melakukan evaluasi dengan berpikir berdasarkan dari sudut pandang yang berbeda baik dari peneliti maupun sumber artikel terpercaya .

4. Penulisan Review

Hasil evaluasi Kritis kemudian dituliskan secara deskriptif terhadap data yang didapat. Penulisan ini juga memuat dampak kebijakan terhadap aspek migrasi, seperti pengungsi dan pencari suaka pasca Brexit.

5. Referensi

Peneliti tetap memperhatikan telaah dan referensi, bagaimana data maupun pernyataan yang diambil dalam penelitian ini, sesuai dengan narasumber yang ada. Referensi menggunakan bantuan

aplikasi mendeley, seperti membuat pengutipan dan yang paling utama adalah perihal daftar pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terhadap dampak kebijakan Brexit, yakni keluar nya Britania Raya dari Uni Eropa secara resmi pada tanggal 31 Januari 2020 pukul 11 malam GMT, menunjukkan hasil sebagai berikut :

Perubahan Kebijakan Migrasi Terhadap Industri Ekonomi

Menangnya referendum Brexit, berdampak pada timbulnya semangat nasionalisme di Eropa. Kepentingan nasional Inggris yang berupa persoalan kedaulatan menjadi alasan dari Brexit, meskipun hal tersebut berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Inggris (Darwis & Howay, 2021)**.** Kasus ini membuktikan bahwa ide-ide kosmopolitan mendapatkan kritikan yang cukup tajam dan gagasan nasionalisme "sempit" kembali menguat. Kritikan tersebut terkait ketidakadilan kebijakan regional yang kurang menguntungkan kepentingan negara-negara anggotanya.

Hal ini juga mengakibatkan perubahan kebijakan di Inggris, terhadap kontrol masuknya pengubah dan pencari suaka yang lebih ketat (Yunazwardi, 2021)**.** Walaupun kebijakan migrasi oleh Brexit telah berubah, dan berakibat timbulnya permasalahan ketenagakerjaan seperti pada bidang agrikultur Pemerintah Inggris Raya menerapkan strategi yang dikatakan cukup efisien. Adapun strategi Pemerintah Inggris Raya turut berupa menerapkan peraturan undang-undang visa pekerja musiman, memberlakukan sistem imigrasi berbasis poin, merumuskan kebijakan agrikultur 2020, mendorong pekerja lokal dan otomatisasi. Strategi kebijakan tersebut dikatakan berhasil karena dapat meminimalisir permasalahan di industri agrikultur Inggris Raya (Azam Abdil Majid et al., 2023).

Pengaruh Investasi Pasca Brexit di Inggris

Uni Eropa sebagai badan Supranasional yang menaungi negara-negara di kawasan Eropa dalam konstitusi hukum, memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil negara anggotanya, termasuk Britania Raya. Bentuk dari pengaruh Uni Eropa terhadap anggota nya, tidak selalu menguntungkan bagi setiap anggota, makanya selaras dengan kebijakan

bersama yang telah disepakati di tingkat kawasan (Setiabudi, 2021)**.** Pada bidang perekonomian terutama sektor Investasi Asing, Inggris adalah salah satu penerima FDI atau Investasi Asing terbesar di antara negara maju di kawasan Eropa. Perkiraan nilai investasi sekitar dua perlima (42,6%, per Januari 2018) dari investasi asing di Inggris datang dari negara UE lainnya.

Keadaan ekonomi besarnya investasi asing tersebut membuktikan betapa penting peran Uni Eropa dalam memposisikan meningkatkan pertumbuhan Investasi Asing di Inggris. Keuntungan Inggris pada sektor ini selama menjadi anggota UE adalah gerakan modal bebas, mempermudah investor dari negara anggota UE lainnya untuk berinvestasi di Inggris, berada di Pasar Tunggal UE menjadikan Inggris sebagai platform ekspor yang menarik bagi perusahaan multinasional dan Pasar Tunggal UE. Keuntungan tersendiri akan hilang, ketika Brexit dilakukan pada tahun 2020 (Muhammad Farhan Anshari & Rusdiyanta, 2020). Berkaca pada tahun 2020, di saat masa transisi Brexit, keluarnya Inggris memberi dampak yang cukup negatif bagi aktivitas perekonomian Uni Eropa, dimana Uni Eropa dan negara-negara anggota yang lain wajib untuk mengisi kekurangan operasional dana, yang disebabkan hilangnya kontribusi pemasukan Inggris bagi ekonomi Uni Eropa (Widura et al., 2022)**.**

Perubahan Kebijakan Perdagangan Internasional Inggris

Inggris secara resmi keluar dari UE pada 30 januari 2020, namun perihal aspek perjanjian perdagangan baru akan mulai diberlakukan secara sementara mulai 1 Januari 2021, kemudian akan dinyatakan secara resmi oleh semua pihak berlaku pada 1 Mei 2021. Perihal perjanjian perdagangan tersebut, membuat aturan hukum kebijakan baru yang mengatur aktivitas perdagangan antara Inggris dan Uni Eropa. Peraturan kebijakan ini diatur dalam *Trade and Cooperation Agreement* (TCA) atau Perjanjian Perdagangan dan Kerja Sama. TCA merupakan dokumen yang mencakup regulasi mengenai aktivitas perdagangan internasional antara Inggris dan Uni Eropa. Memang sejatinya TCA hampir menyerupai dengan *Free Trade Agreements* lainnya, maka dari itu berarti TCA dikatakan sebagai perjanjian hukum perdagangan dengan pengenaan bebas biasa, dengan menghapus semua tarif dan kuota pada perdagangan Inggris - Uni Eropa.

Kasus ini menyimpulkan bahwa korelasi perdagangan antara Inggris dan Uni Eropa mengalami penurunan, dengan kondisi sebelumnya terlibat dalam pasar tunggal *(single market)*

dan serikat pabean *(customs union).* Dampak kebijakan Brexit tampak terlihat juga pada perubahan regulasi aktivitas perdagangan Inggris-Uni Eropa terlihat pada sektor maritim. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa jumlah lalu lintas internasional jalur laut, yang mencakup kegiatan perdagangan internasional per 2022 mencapai 355,1 juta ton, namun tetap 7% lebih rendah daripada data 2019 disaat Inggris masih memiliki akses pada pasar tunggal UE dan tidak mengadopsi kebijakan TCA sebagai regulasi baru yang pada jalur laut nya (Dewi & Abdullah, 2023).

KESIMPULAN

Referendum Brexit, berdampak pada timbulnya semangat nasionalisme di Eropa. Walaupun kebijakan migrasi oleh Brexit telah berubah, dan berakibat timbulnya permasalahan ketenagakerjaan seperti pada bidang agrikultur Pemerintah Inggris Raya menerapkan strategi yang dikatakan cukup efisien. Adapun strategi Pemerintah Inggris Raya turut berupa menerapkan peraturan undang-undang visa pekerja musiman, memberlakukan sistem imigrasi berbasis poin, merumuskan kebijakan agrikultur 2020, mendorong pekerja lokal dan otomatisasi.

Pada bidang perekonomian terutama sektor investasi asing berkaca pada tahun 2020, di saat masa transisi Brexit, keluarnya Inggris memberi dampak yang cukup negatif bagi aktivitas perekonomian Uni Eropa, dimana Uni Eropa dan negara-negara anggota yang lain wajib untuk mengisi kekurangan operasional dana, yang disebabkan hilangnya kontribusi pemasukan Inggris bagi ekonomi Uni Eropa. Kekhawatiran investasi yang merupakan bagian dari aspek perdagangan-ekonomi, dari kebijakan Brexit itu sendiri menyebabkan ekonomi Inggris sempat mengalami penurunan, sehingga membuat negara lain seperti Jepang khawatir terhadap investasinya di Inggris akan mengalami kerugian. Tetapi disisi lain menjadi dampak positif bagi Inggris dengan adanya pasar tunggal.

DAFTAR PUSTAKA

Azam Abdil Majid, Sindy Yulia Putri, & Dwi, A. W. R. (2023). Strategi Inggris Raya Terhadap Permasalahan Industri Agrikultur Pasca Brexit. *International Journal of Research in Science, Commerce, Arts, Management and Technology, 10*(3), 410–421. https://doi.org/10.48175/ijarsct-13062

Darwis, D., & Howay, T. (2021). Keluarnya Britania Raya dari Keanggotaan Uni Eropa dan Implikasinya Bagi Perekonomian. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, *1*(2), 69–82. https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.69-82

Dewi, R. P., & Abdullah, N. (2023). Dampak Keluarnya Inggris Dari Uni Eropa Terhadap Regulasi Perdagangan Internasional Jalur Laut Antara Inggris Dan Uni Eropa. *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, *2*(03), 173–185. https://doi.org/10.62668/kapalamada.v2i03.819

Hofi, M. A., & Wicaksono, T. (2023). Menjaga Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dalam Bidang Politik, Hukum, Dan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, *1*(3), 141–153. https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3

Muhammad Farhan Anshari, & Rusdiyanta. (2020). Potensi Dampak Brexit terhadap Perekonomian Inggris. *Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy*, *4*, 196–206.

Nurdin. (2023). Kesejahteraan Sosial dalam Persepektif Demokrasi dan Otoritarian: Analisis Perbandingan Inggris dan Singapura. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, *4*(2), 140–167. https://doi.org/10.33822/jpds.v4i2.6192

Setiabudi, C. S. (2021). Pengaruh Kebijakan Pengungsi Uni Eropa Terhadap Perkembangan Gerakan Eurosceptic Di Eropa. *Wanua : Jurnal Hubungan Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin*, *6*(1), 81. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14639947.2011.564813%0Ahttp://dx.doi.org/10.1080/15426432.2015.1080605%0Ahttps://doi.org/10.1080/15426432.2015.1080605%0Ahttp://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/abaj102&div=144&start_page=26&collectio

Sutantri, S. C., Moenardy, D. F., & Fitri, R. J. (2021). Investasi Ekonomi Jepang Di Inggris Dalam Bidang Industri Otomotif Pada Masa Transisi Brexit 2014-2018. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains*, *1*(1), 21–30. https://doi.org/10.33197/bes.vol1.iss1.2021.648

Widura, J. T., Haqqi, H., & Wijayati, H. (2022). Pengaruh Brexit Terhadap Ekonomi Uni Eropa Di Masa Transisi Tahun 2020. *Solidaritas*, *6 (1)*(1), 12.

Yunazwardi, M. I. (2021). Narasi Anti-Imigran Dalam Krisis Pengungsi Eropa Tahun 2015 Sebagai Refleksi Atas Krisis Identitas Eropa. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, *6*(2), 313–341. https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/dauliyah/article/view/6599

Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL),
Vol. 3 Issue.3 No.5, July 31, 2024(165- 179)
E-ISSN : 29624665

PEMIKIRAN DAN GERAKAN POLITIK MARIA WALANDA MARAMIS DALAM MEMPERJUANGKAN HAK PEREMPUAN DI SULAWESI UTARA TAHUN 1890-1924

Dewi Ria Komala Sari[1], Dr. Taufiq Akhyar[2], Norma Juainah[3]

Ilmu Politik, FISIP, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email Coresponden : dewiriaks123@gmail.com

ABSTRACT

In the records of the Dutch colonial period, women's right to vote and be elected in the world of government was very marginalized, and even their voice had to be limited. Minahasa is one of the districts in North Sulawesi Province which has a female feminist figure, namely Maria Walanda Maramis, who was born in Kema Village, North Sulawesi. Maria Walanda Maramis is a feminist figure who played a role in fighting for women's political rights, especially the right to vote and be elected, especially women's political rights in the Minahasa region, North Sulawesi Province. Maria Walanda Maramis is aware of the importance of a mother's role in the household. At the time of Maria Walanda Maramis, many women in Minahasa had their rights in government life very oppressed, even their right to education was very limited, women's interests were ignored and tended to be put aside. It was this woman's condition that moved Maria Walanda Maramis' heart to fight. In this research, the author will see how Maria Walanda Maramis' thoughts gave birth to a feminist movement by building the PIKAT (Love of Mothers for Their Children) Organization, building schools, writing opinions in newspapers and campaigning to voice women's rights.

Keywords: *Thought, Maria Walanda Maramis, Women, Minahasa, North Sulawesi*

ABSTRAK

Dalam catatan masa kolonial Belanda, hak memilih dan dipilih perempuan dalam dunia pemerintahan sangatlah terpinggirkan, bahkan untuk bersuarapun harus terbatasi. Minahasa adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki seorang tokoh feminis perempuan yaitu Maria Walanda Maramis yang lahir di Desa Kema Sulawesi Utara. Maria Walanda Maramis adalah seorang tokoh feminis yang berperan dalam memperjuangkan hak politik perempuan terutama dalam hak memilih dan dipilih, khususnya hak politik perempuan daerah Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Maria Walanda Maramis sadar akan pentingnya peran seorang ibu dalam rumah tangga. Zaman Maria Walanda Maramis banyak kaum perempuan di Minahasa yang haknya dalam kehidupan pemerintahan sangat tertindas bahkan hak untuk menempuh pendidikan-pun sangat dibatasi, kepentingan-kepentingan kaum perempuan tidak di hiraukan dan condong di kesampingkan. Keadaan perempuan demikianlah yang membuat hati seorang Maria Walanda Maramis tergerak untuk berjuang. Dalam penelitian tersebut penulis akan melihat bagaimana pemikiran Maria Walanda Maramis tersebut melahirkan suatu gerakan feminis dengan membangun Organisasi PIKAT (Percintaan Ibu Kepada Anak Turunannya), membangun sekolah, dan menuliskan opini di surat kabar serta berkampanye menyuarakan hak perempuan.

Keywords: Pemikiran, Maria Walanda Maramis, Perempuan, Minahasa, Sulawesi Utara

PENDAHULUAN

Gerakan feminisme dimulai sejak akhir abad ke 18 dan berkembang pesat sepanjang abad ke-20 yang dimulai dengan penyuaraan persamaan hak politik bagi perempuan. Munculnya gerakan feminisme pertama kali di negara-negara bagian barat. Feminisme merupakan sebuah gerakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. tujuan utamanya ialah mengeluarkan kaum perempuan dari kondisi ke tidak bebasan dan ke tidak adilaan. Pada feminisme gelombang pertama, lebih terfokuskan pada kesenjangan politik, terutama dalam memperjuangkan hak pilih dan dipilih yang dimiliki kaum perempuan atau emansipasi di bidang politik. (Farida Hanum, 2018)

Penelitian ini menjelaskan tentang kehidupan perempuan terdahulu sebelum Indonesia merdeka. Perempuan di persepsikan sebagai orang yang harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, maka mereka tidak perlu turut mengambil keputusan tentang kebaikan bersama atau menggunakan hak-hak pilihnya (Mutiah Amini, 2021). Nasaruddin Umar mengatakan, bahwa gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya, yang merupakan suatu bentuk rekayasa masyarakat atau social contruction (Julia Cleves, 2018), bukan sesuatu yang bersifat kodrati. Fakta sosial di masyarakat juga menunjukan kenyataan bahwa telah lama terjadi ketidakadilan hak dan peran yang diterima perempuan. Berdasarkan pemahaman yang cerdas atas permasalahan konteksnya seorang pejuang sekaligus tokoh pemimpin gerakan perempuan dari Sulawesi Utara yaitu Maria Walanda Maramis yang merupakan perintis pergerakan bangsa Indonesia agar semua perempuan memiliki hak pilih yang sama seperti kaum laki-laki.

Maria Walanda Maramis, yang lahir pada 23 Juli 1872 di Tondano, Sulawesi Utara, tumbuh dalam lingkungan ini. Kondisi sosial beliau membawa kesadaran akan ketidaksetaraan gender yang meluas di masyarakatnya. Pada awal tahun 1890-an, Maria Walanda Maramis mulai menunjukkan ketertarikan pada perubahan sosial dan politik. Ia mendorong perubahan dalam pendidikan perempuan, mengadvokasi hak-hak perempuan, dan menyuarakan pentingnya peran perempuan dalam kemajuan masyarakat. (Denni, 2022). Maria Walanda mendirikan sekolah Rumah Tangga, beliau menjadikan pendidikan sebagai titik strategis yang harus didobrak. Selain itu, beliau juga mendirikan organisasi "Percintaan Ibu Kepada Anak Turunannya" (PIKAT) untuk memprakarsain sekolah perempuan dan anak yang telah didirikan beliau.

Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, perempuan umumnya ditempatkan dalam peran yang terbatas, terutama dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan politik. Perjuangan Maria Walanda Maramis begitu besar, tidak hanya sebatas tentang isu-isu gender saja tetapi lebih luas dari itu. Wilayah Sulawesi Utara juga merupakan bagian dari Hindia Belanda, yang berarti adanya

pengaruh kuat dari kolonialisme Belanda. Maria Walanda Maramis terlibat dalam perjuangan nasional yang lebih luas untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Maria Walanda Maramis menghadapi tekanan ganda. Maria Walanda tidak hanya berhadapan dengan pemerintah kolonial Belanda yang mencoba mempertahankan kendali mereka, tetapi juga dengan resistensi dari dalam masyarakatnya sendiri yang masih erat berpegang pada tradisi patriarki. Perjuangan ini mencerminkan dinamika sosial dan politik yang kompleks pada masa itu.

Maria Walanda adalah seorang pejuang yang memperjuangkan hak perempuan dan menjadi perwakilan kaum perempuan terutama di daerah beliau pada masa itu dikarnakan pengetahuan dan kecerdasannya. Kontribusi beliau dalam menggaung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sangatlah besar. Maria Walanda aktif menuliskan gagasan-gagasan tentang memajukan perempuan melalui surat kabar. Selain itu, beliau juga mengadakan kampanye hingga ke Batavia melalui sejumlah surat mengenai keterwakilah serta keterlibatan perempuan di politik pemerintahan. Menurut pemikiran Maria Walanda maramis, Perempuan adalah inti dari rumah tangga yang menjadi inti dari masyarakat, perempuan berhak mendapatkan kedudukan yang sama dengan laki-laki (Ivan, 2017).

Mary Wollstonecraft dalam teori feminisme liberal mengatakan bahwa kostruksi sosial yang membangun pencitraan perempuanlah yang membuat kaum perempuan terlihat lemah dan tidak rasional. (Farida, 2018). Sama halnya dengan pemikiran Maria Walanda bahwa menurutnya persepsi bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah tidaklah bersifat kodrati melainkan tercipta karna budaya yang dianut oleh masyarakat. (Denni, 2022). Hal tersebut di sebabkan karna perempuan di Minahasa harus berhadapan dengan politik konstruksi kolonial yang patriarki. Perbedaan pemikiran Maria Walanda dengan teori dari Mary Wollstonecraft dapat dilihat dari gerakannya. Maria Walanda menganggap bahwa pendidikan adalah hal yang penting demi tercapainya kesadaran kaum perempuan akan hak mereka yang tertindas, sedangkan Mary Wollstonecraft hanya melakukan gerakan politik yang mempengaruhi kesenjangan politik dimiliki kaum perempuan saja dan tidak melakukan peran dengan pendidikan.

Kisah tokoh Maria walanda Maramis ini layak untuk di angkat dalam sebuah tulisan karya ilmiah. Kerasnya perjuangan serta kegigihan beliau dapat memotivasi serta mendorong kaum perempuan pada masa modern ini, agar senantiasa sadar bahwa penindasan seperti itu dapat saja terulang kembali namun dalam kemasan yang perempuan yang lebih luas di Indonesia.berbeda. Dalam penelitian ini Penulis akan mengkaji lebih dalam pemikiran dan gerakan politik Maria Walanda Maramis dalam konteks perjuangan hak perempuan di Sulawesi Utara selama periode 1890 hingga 1924. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangannya dan

dampaknya, kita dapat memahami bagaimana perjuangannya memengaruhi perubahan sosial dan politik di Sulawesi Utara serta kontribusinya dalam gerakan hak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang di ajukan dalam sebuah riset (Dini & Tuti, 2020). Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode penelitian kulitatif dengan jenis penelitian historis yaitu meneliti dan mengeksplorasi melalui sejarah, dan kajiannya adalah kajian kepustakaan (library research) yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis dan data yang di peroleh dari pustaka, yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Analisis data ini dilakukan dengan mengelompokkan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan merujuk pada miles dan Huberman, yaitu analisis kualitatif terdiri atas tiga arus utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Namun teknik penelitian yang peneliti gunakan melengkapi satu proses lagi yaitu analisis terhadap data, dengan demikian teknik analisis data dalam penelitian yang akan peneliti lakukan ini terdapat 4 langkah yaitu reduksi data, penyajian data, analisa data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu memilih data-data yang telah didapatkan dan membaginya ke beberapa kelompok. Selanjutnya peneliti melakukan penyajian data dengan mengelompokan materi. Lalu, tahap analisis data pada penelitian yang akan di teliti, yaitu melakukan analisis data dari data yang telah disajikan. Peneliti akan mengklasifikasikannya, lalu mencari generalisasi gagasan yang spesifik. Setelah itu, nantinya akan dicari relevansi dengan politik di Indonesia. Pada penelitian studi tokoh ini, data analisis di dapatkan secara induktif berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh sebab itu, pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan.

HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini bersifat kualitatif. Berdasarkan data yang sudah peneliti temukan dan hasil yang sudah peneliti lakukan, peneliti akan melakukan pemilihan data yang diperoleh menurut dari beberapa sumber data yang ada. Peneliti akan melihat gerakan-gerakan apa saja yang dilahirkan Maria Walanda dari pemikirannya, serta bagaimana uraian kehidupan dan perjuangan Maria Walanda pada masa tersebut. setelah peneliti melakukan pemilihan data dari sumber-sumber yang menjelaskan tentang Maria Walanda mengenai pemikiran dan gerankannya dalam memperjuangkan hak politik perempuan, maka peneliti akan melakukan pengolaan data dan analisa data. Berdasarkan

data-data yang peneliti peroleh, maka peneliti akan menganalisisnya menggunakan teori Feminisme Liberal yang di cetuskan Mary Wollstonecraft dalam buku A Very Short Introduction. Data-data yang telah terkumpul akan di analisa dengan teori berdasarkan teori, sehingga nantinya peneliti akan dapat menyimpulkan hasil yang di dapatkan dari penelitian mengenai Pemikiran Maria Walanda Maramis dalam Memperjuangkan Hak Perempuan di Sulawesi Utara Tahun 1890-1924.

A. Pemikiran Maria Walanda Maramis Mengenai Feminisme

Hasil data yang peneliti dapatkan dari pengelompokkan data yang diperoleh dari sumber buku, jurnal, dan juga tesis yang terdapat sebuah gagasan-gagasan dari pemikiran yang telah Maria Walanda Maramis tulis dalam memperjuangkan hak perempuan terutama hak memilih dan dipilih. Untuk mengetahui apakah di dalam pemikiran Maria Walanda tersebut terdapat gagasan feminisme dan gerakan apa saja yang beliau lakukan maka peneliti menggunakan teori feminisme liberal untuk memperjelas adanya gagasan feminisme dalam pemikiran Maria Walanda Maramis dan gerakan yang beliau lakukan. Peneliti akan memuat awal terbentuknya pemikiran Maria Walanda Maramis tentang gagasan feminisme yaitu sebagai berikut:

1. Maria Walanda dan hak perempuan Sulawesi Utara

Sejak awal Maria Walanda Maramis sudah bergulat dengan konteks masyarakatnya yang sudah di pengaruhi oleh ideologi patriarki barat tradisi dan budaya Minahasa bukanlah penyebab utama kasus yang membedakan hak pendidikan antara perempuan dan laki-laki, dan bahkan hak politik, melainkan disebabkan karena ideologi patriarki Barat yang masuk sejalan bersama kehadiran kolonialisme dan kristenisasi. (Merlin, 2021).

Kolonialisme dan kristenisasi pada zaman itu sudah merubah banyak nilai-nilai luhur perihal relasi perempuan dan laki-laki. Sehingga masyarakat dan kaum laki-laki beranggap dan berfikir bahwa perempuan ideal itu adalah perempuan yang tunduk, anggun, mendampingi suami, dan melahirkan anak, terperangkap dalam ruang domestik dan ruang dapur, dan tidak boleh berbeda, lebih-lebih jika menggugat kekuasaan negara yang dicerminkan dalam kekuasaan suami (Lakawa, 2018). Struktur kolonial yang seksis dan rasis serta hirarkis mampu di katakan adalah faktor penyebab terjadinya ketidaksetaraan gender dan penindasan pada hak perempuan pada zaman itu.

2. Perpindahan Maria Walanda ke Maumbi dan kedekatanya dengan orang eropa

Pada tanggal 22 Oktober 1890, Maria Walanda menikah dengan Jozef Frederik Calusung Walanda. Maria Walanda dan Jozef lantas menetap di Maumbi. Ayah Jozef adalah seorang pemuka agama Kristen. Zendeling yang bertugas di Maumbi waktu itu adalah Jan Ten Hove yang bersama istrinya melayani jemaat Kristen di sana. Zendeling Ten Hove adalah seorang yang

berminat terhadap belajar budaya lokal. Orang-orang Eropa pada dasarnya berpendidikan dan harus memperluas wawasannya dengan membaca sumber-sumber informasi. Maria Walanda Maramis bergaul dekat dengan keluarga Pendeta Ten Hove terutama dengan sang nyora, karna beliau dapat mengimbangi pola kehidupan intelektual mereka. (Hafidz, 2023).

Keterampilan membaca, menulis bahasa Melayu dan bahasa Belanda juga sudah Maria Walanda kembangkan sejak awal. Di rumah keluarga Pendeta Ten Hove, terutama pada sang nyora, Maria Walanda belajar banyak hal baru. Anak Maria Walanda menuliskan tentang interaksi antara ibunya dengan nyora Ten Hove, yaitu sebagai berikut:

> Karena pendekatan dengan keluarga Ten Hove ini, Maria dapat melihat dengan nyata betapa besarnya perbedaan antara bangsanya dan bangsa Belanda. Maria Walanda banyak sekali belajar dari Nyora Ten Hove. Nampaknya beliau telah mengambil keputusan untuk belajar segalanya yang baik di lihat, untuk nanti di tularkan kepada teman-teman perempuannya di desa, yang masih sangat kurang pengetahuannya tentang hygiene atau ilmu kesehatan, ilmu didik anak, pemeliharaan rumah, dapur, halaman atau pekarangan, tentang ketertiban dan disiplin dalam sebuah rumah tangga, serta tentang keterampilan-keterampilan wanita. (Matuli Walanda dalam Denni, 2022)

Dari tulisan tersebut dapat disimpulkan kedekatan Maria Walanda dengan keluarga eropa ini membuat beliau sadar bahwa terdapat perbedaan besar antara bangsanya dan bangsa belanda. Kedekatan dengan keluarga zendeling Jan Ten Hove terutama dengan istrinya, dapat dikatakan sebagai masa persiapan dan pembentukan kesadaraan, pengetahuan dan kecakapan. Pergaulan dengan keluarga zendeling Jan Ten Hove tentu telah memperluas wawasan Maria Walanda.

3. Penolakan sekolah terhadap anak-anak perempuan pribumi

Selain pengalaman bersama kakaknya Antje, ada satu hal lagi yang memicu sikap kritis Maria Walanda Maramis yaitu ada kaitannya dengan dua anak perempuannya yang sempat di tolak di sekolah berbahasa Belanda. Dua anak perempuan tersebut adalah Anna Pawlona dan Raukonda. Jozef dan Maria Walanda berkeinginan kuat agar kedua anak perempuan mereka dapat mengenyam pendidikan yang tinggi dan layak. salah satunya ialah bersekolah di Europe Lager School (ELS) di Manado. Awalnya mereka pikir mudah karena ayah mereka Jozef adalah seorang guru di Hollandsch Indlansch School (HIS) sejak tahun 1916. (Denni, 2022)

Harapan kedua anak perempuan Maria Walanda sirna ketika mengetahui bahwa ternyata ELS hanya di peruntukkan untuk anak di keluarga Eropa. Tetapi Jozef dan Maria Walanda sebagai orang tua tidak putus asa. Mereka kemudian mencoba lagi dan lagi, hanya karna ada kesan dari pihak sekolah mereka seperti melawan ketentuan yang sebenarnya rasis itu, maka seketika Jozef

di bebas tugaskan sebagai pengajar di HIS. Tetapi pembebas tugasan tersebut tidak berangsur lama. Setelah pada akhirnya dua anak perempuan Maria Walanda yaitu Anna Pawlona dan Raukonda di terima di ELS. Mereka di nyatakan lulus dalam tes tersebut, Tetapi rasis kolonial memunculkan masalah baru. Pengalaman inilah yang juga menjadi salah satu daya dorongan Maria Walanda untuk memperjuangkan hak-hak kemanusiaan kaum perempuan. (Hafidz, 2023)

Gagasan Maria Walanda dalam memperjuangkan pendidikan perempuan, di tulis dalam surat kabar Keng Hwa Poo (edisi Maret 1921), dengan berkata:

> Berjoeta2 roepijah anak2 perempoean Minahasa Soedah boeang oeangnja sedang kebanjakan antaranja beloem berpadanan dengan keadaan roemah-tangganja dll. Pembatja2 jang soenggoeh2 bertjintakan nasib bangsa perempoean Minahasa kiranja perhatikanlah hal ini. (Maria Walanda dalam Denni, 2022)

Dari pokok pikiran Maria Walanda Maramis tersebut beliau tampak prihatin terhadap perempuan Minahasa. Maria Walanda berusaha memahami situasi secara kritis, terutama masalah di kalangan sebagian keluarga-keluarga Minahasa, yaitu lebih mengutamakan "gaya" dari pada kualitas hidup anak-anak perempuannya. Begitulah kenyataan yang terjadi di Minahasa pada masa itu.

4. Keprihatinan Maria Walanda terhadap hak politik perempuan Sulawesi Utara

Tahun 1903 seorang menteri koloni pada Parlemen Belanda berhasil mengajukan undang-undang desentralisasi bagi daerah Hindia Belanda. Dari terbentuknya pasal tersebut lalu direncanakanlah pembentukan dewan daerah. Pada saat itu kursi dewan daerah Minahasa hanya di isi oleh kaum laki-laki saja, karna Minahasa berhadapan dengan politik konstruksi kolonial yang patriarki. Perjuangan untuk hak pilih dan dipilih untuk kaum perempuan sama halnya dengan melawan konstruksi paham politik kolonial yang hampir sempurna mengubah tatanan sosial, politik, ekonomi dan juga psikologi kaum pribumi saat itu. (Denni, 2022).

Maria Walanda Maramis sadar bahwa kaum perempuan harus bangkit dari keterpurukannya. Adapun gagasan dari pemikiran Maria Walanda Maramis yang dikutip dari buku "PEREMPUAN MINAHASA MELAWAN KOLONIALISME (Perjuangan Maria Walanda Maramis dan PIKAT di Bidang Pendidikan dan Politik)" salah satunya yaitu sebagai berikut:

> "Disini saja mengirim hormat dan dengan satoe djabatan tangan jang koeat kepada sekalian teman-teman bangsa perempoean Minahasa serta mengoetjap: 'hip, hip, hoera!' Dengan meloepa kebodohan dan kerendahan, maka beranilah saja oetjapkan kepada publiek, bahwa sampailah waktoenja perempoean-perempoean Minahasa bangoen dari tidoernja. Padanglah kesebalah timoer, dimana matahari moelai terbit." (Maria Walanda Dalam Denni, 2022)

Dari gagasan tersebut Maria Walanda Maramis dapat membawa kesadaran dalam diri setiap perempuan di Minahasa saat itu. Maria Walanda Maramis juga mendirikan organisasi Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya (PIKAT) untuk perkumpulan kaum perempuan Minahasa membahas masalah-masalah yang terjadi kepada kaumnya dan langkah-langkah apa saja yang akan di ambil untuk memperebutkan hak mereka. Maria Walanda berfikir bahwa Perjuangan tidak harus dengan mengangkat senjata tetapi juga bisa di lakukan lewat organisasi yang terstruktur.

Dengan adanya kontribusi perempuan dalam dunia pemerintahan baik itu hak memilih maupun hak dipilih, maka itu akan menjadi kesempatan mereka dapat mengungkapkan keinginan dan kebaikan kaumnya. Oleh sebab itu MariaWalanda memperjuangkan hak perempuan dalam memilih dan dipilih. Menurut pemikiran Maria Walanda Negara di bentuk atas dasar tujuan dan kepentingan bersama, yang tentunya perempuan juga turut andil dalam konstitusi bukan hanya laki-laki.(Denni, 2022).

B. Peran Maria Walanda dalam Memperjuangkan Hak Perempuan yang Mempengaruhi Perkembangan Sosial dan Politik

Menurut hasil data yang di dapatkan peneliti mengenai peran apa saja yang di lakukan maria Walanda Maramis dengan pemikirannya tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. PIKAT (Percintaan Ibu Kepada Anak Turunannya) sebagai gerakan perempuan di Minahasa

PIKAT adalah gerakan perempuan Minahasa yang di pelopori oleh Maria Walanda Maramis. Tujuan awal Maria walanda mendirikan organisasi PIKAT adalah untuk mengumpulkan atau mempersatukan kaum perempuan dan menyadarkan mereka akan pentingnya sebuah organisasi untuk mendobrak sistem patriarki kolonialis yang saat itu mengakar kuat pada budaya serta kehidupan masyarakat. Maria Walanda berhasil membuat seluruh kaum perempuan sadar akan pentingnya memperjuangkan hak mereka, sehingga organisasi PIKAT semakin meluas bahkan sampai ke pulau jawa. (Ivan, 2017).

2. Pendidikan sebagai alternatif untuk kesetaraan

Maria Walanda juga mendirikan sebuah Sekolah pertama bagi perempuan, menurut Maria Walanda, pendidikan merupakan hal yang penting untuk di bangun demi terbentuknya generasi bangsa yang berkualitas karna Maria Walanda percaya bahwa generasi yang hebat lahir dari ibu yang cerdas. Beliau berfikir dengan jalur pendidikan kaum perempuan dapat berkembang pemikiran dan juga pengetahuannya terutama akan hak-hak mereka yang tertindas dalam bidang publik dan pemerintahan. (Ivan, 2017).

Melalui "huishoud-school" yang sudah berdiri bersama pendirian PIKAT tahun 1917 namun baru mendapat pengesahan pemerintah pada 16 Januari 1919 (Denni,2022). Dalam satu tulisannya di surat Kabar Keng Hwa Poo (edisi Maret 1921), Maria Walanda menghimbau publik Minahasa untuk mendukung usaha PIKAT tersebut.

> ...ada bertambah banyak peladjar oentoek nona2 jang tida ada djalan boeat beladjar menjadi goeroe, klerk, dll: maka dapatlah ia belajar roepa2 pekerdjaan roemah tangga oentoek hidoepnja boeat hari2 jang datang, baik selakoe kepala roemah tangga, baik selakoe manoesia jang mentjahari redjikinja dengan taoesah meliwat watas kesopanan bangsa perempoean. (Maria Walanda Maramis Dalam Denni, 2022)

Tulisan tersebut bernada himbauan. Bahwa, sekolah ini adalah untuk gerakan memajukan harkat dan martabat perempuan. Dengan memiliki pengetahuan dan ketrampilan, maka perempuan Minahasa dapat mengembangkan hidupnya secara bermartabat. Demi untuk meyakinkan publik Minahasa pentingnya "huishoud-school" tersebut, maka Maria Walanda Maramis melanjutkan tulisannya dengan berkata:

> Pembatja jang terhormat! Bandinglah kemadjoean dagang jang menjual roepa2 pakeain dan barang Europa jang bagoes! berdjoeta2 roepijah anak2 perempoean Minahasa soedah boeang oeangnja sedang kebanjakan antaranja beloem berpadanan dengan keadaaan roemah-tangganja dll. Pembatja2 jang soenggoeh2 bertjintakan nasib bangsa perempoean Minahasa kiranja perhatikanlah hal ini. (Maria Walanda dalam Denni, 2022)

Dari pokok pikiran Maria Walanda Maramis tersebut tampak keprihatinannya yang mendalam terhadap perempuan Minahasa, dan kedudukan keluarga dalam masyarakat yang sedang berubah tersebut. Maria Walanda Maramis berusaha memahami situasi secara kritis, terutama dalam hal konsumerisme yang sedang menggejala di kalangan keluarga-keluarga tertentu Minahasa, yaitu tren mengutamakan "gaya" daripada kualitas hidup.

Pada tanggal 12 Juni 1932, PIKAT mendirikan lagi "Vakschool" (sekolah kejuruan) yang diperuntukkan bagi anak perempuan yang telah menyelesaikan sekolah dasar Eropa. Di sekolah ini para murid diajarkan pengetahuan dan ketrampilan memasak dan berbagai macam resep, nutrisi, kesehatan, pengembangan pendidikan, administrasi, perawatan binatu, ekonomi rumah tangga, menjahit dan menambal. Sekolah menjadi gerakan alternatif untuk mengangkat derajat perempuan oleh karena politik kolonial pada berbagai bidang yang diskriminatif. (Denni,2022).

3. Maria Walanda Maramis dan PIKAT sebagai gerakan intelektual

Maria Walanda Maramis adalah pejuang emansipasi yang menjadi tonggak perempuan di Minahasa bergerak. Maria Walanda dan organisasi PIKAT bersama-sama membangun cita-cita untuk memperjuangkan hak perempuan (Denni, 2022). Maria Walanda Maramis mengatakan:

> Disini saja mengirim hormat dan dengan satoe djabatan tangan jang koeat kepada sekalian teman2 bangsa perempoean Minahasa serta mengoetjap: "hip, hip, hoera!" Dengan meloepa kebodohan dan kerendahan, maka beranilah saja oetjapkan kepada publiek, bahwa sampailah waktoenja perempoean2 Minahasa bangoen dari tidoernja. Pandanglah kesebelah timoer, dimana matahari moelai terbit.

Pokok pikiran tersebut menggambarkan suatu kesadaran dan intelektualitas seorang Maria Walanda Maramis, bahwa tercapainya maksud perjuangan hak pilih perempuan membutuhkan suatu dukungan publik, yaitu terutama adanya kesadaran bersama untuk perubahan. Pemikiran ini adalah juga suatu keprihatinan terhadap situasi yang sedang mengemuka. Bahwa patriarki kolonialisme dan juga kekristenan telah menyebabkan perempuan Minahasa, terutama generasi mudanya telah hampir kehilangan kesadaran betapa pentingnya perempuan berpartisipasi dalam politik, sebab kedudukan Minahasa Raad misalnya adalah strategis dalam menentukkan arah kehidupan bersama secara lebih adil.

Dalam hal pendidikan di Minahasa, pendidikan tinggi untuk pribumi hanya untuk laki-laki yang terutama berasal dari keluarga elit. Dalam hal hak pilihpun diskriminasi tampaknya lebih dominan berasal dari paham dan struktur negara kolonial yang patriarki dan hirarkis. Paham dan struktur tersebut adalah watak khas negara kolonial. Hak politik diberikan kepada laki-laki dari keluarga elit yang dalam asumsi kolonial elitisisme sosial ini justru menjadi struktur pendukung kolonial. Namun, sejarah menunjukkan bahwa perlawanan terhadap kolonial secara politik berasal dari massa rakyat yang terus menerus mengalami ketidakadilan dan kaum. terpelajar dari keluarga-keluarga elit. (Denni,2022).

Maria Walanda Maramis yang kemudian memperoleh posisi sebagai "nyora guru", dan PIKAT yang juga pengurusnya berasal dari kalangan elit Minahasa sepertinya adalah fenomena paradoks dalam kolonialisme. (Ivan, 2017). Sebab justru elitisisme mereka secara sosial dan intelektual tersebut telah berkembang menjadi gerakan memperjuangkan hak pilih bagi kaum perempuan. Perjuangan ini sepertinya adalah juga sikap politis mendobrak paham dan struktur negara kolonial yang patriarki dan diskriminatif. Maria Walanda Maramis dan PIKAT percaya dan yakin, bahwa jalan untuk memperjuangkan harkat dan martabat kaum perempuan adalah melalui jaminan hak bebas berpikir, berpendapat dan berbicara. Hak pilih bagi kaum perempuan adalah wujud dari kebebasan tersebut.

4. Keharusan hak pilih bagi perempuan

Pada tahun 1919 didirikan Dewan Minahasa. Masa itu keharusan hak pilih dan dipilih hanya dimiliki kaum laki-laki saja dan perempuan tidak di ikut sertakan, baik itu dalam hal memilih ataupun dipilih. Perempuan pribumi mengalami banyak masalah, yaitu dia sebagai perempuan yang berhadapan dengan patriarki kolonial; sebagai warga jajahan ia tidak memiliki hak politik; dan seterusnya. (Denni, 2022). PIKAT kemudian pada akhirnya melibatkan diri pada diskursus hak pilih perempuan. PIKAT yang berdiri pada tahun 8 Juli 1917, segera melakukan aksi-aksinya sesuai dengan visi-misinya. (Kaunang, 2017). Keberadaan PIKAT yang cepat berkembang tersebut rupanya dengan segera diketahui oleh pengurus VVV (Vereeniging Voor Vrouwenkiesrecht) di Batavia. Maria Walanda Maramis dalam tulisannya di Surat Kabar Keng Hwa Poo edisi 28 Mei 1921 memulai paragraf pertama dengan informasi ini:

> Pada boelan December 1918 kami Hoofdbestuur "Pikat" dapatlah djempoetan dan pertanjaan dari njonja2 Bestuur dari Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht di Batavia, kalau2 kami setoedjoe dengan mereka itoe akan minta pada pemarintah agoeng soepaja bangsa perempoean boleh mendapat kiesrecht (hak memilih) sama seperti lelaki. (Maria Walanda dalam denni, 2022)

Rupanya PIKAT memiliki kontak dengan VVV. VVV di Batavia sedang menghimpun dukungan dari organisasi-organisasi perempuan se-Hindia Belanda untuk mengajukan aspirasi mereka ke Volksraad agar perempuan memiliki hak pilih. PIKAT sangat mendukung langkah-langkah VVV di Batavia. Maria Walanda Maramis dalam tulisannya itu melanjutkan:

> Waktoe itoe kami soedah djawabkan bahwa kami setoedjoe. Serta kami soedah mengirim pada pemarintah agoeng soeatoe rekest menoeroet tjonto njonja2 terseboet. (Maria Walanda dalam Denni, 2022)

Dari tulisan tersebut Maria Walanda menjelaskan bahwa beliau setuju dengan langkah-langkah dan keputusan yang di ambil oleh VVV Batavia. Maria Walanda saat itu yang memang sedang berusaha agar perempuan memiliki hak terutama hak pilih sangatlah mendukung keputusan yang di buat tersebut.

Elsbeth Locher-Scholten mengutip Handelingen Volksraad 1919 menuliskan, saat pembahasan di Volksraad, sebagian besar para anggota dewan orang Minahasa menyatakan dukungannya untuk hak pilih perempuan di dewan ini. Dasar argumen mereka adalah adat, bahwa di Minahasa persamaan hak antara laki-laki dan perempuan telah ada sejak lama. Para anggota dewan mayoritas setuju kecuali seorang Calvinis - untuk mendukung petisi VVV yang menuntut hak pilih perempuan, tulis Handelingen Volksraad. (Denni, 2022).

Di tahun-tahun itu, Gubernur Jenderal rupanya telah menyatakan dukungannya terhadap petisi yang disampaikan oleh sejumlah asosiasi perempuan yang menuntut pemberian hak politik perempuan. Organisasi PIKAT yang di ketuai Maria Walanda adalah satu dari sedikit organisasi perempuan pribumi se Hindia-Belanda yang bergerak bersama menuntut hak pilih bagi perempuan tersebut. Merespon petisi tersebut, Volksraad menyatakan keinginannya untuk memperoleh dukungan lebih banyak organisasi perempuan pribumi. Demikian seperti dikutip dari De Locomotief edisi 14-02-1919. (Ivan, 2017).

Perjuangan Maria Walanda bersama PIKAT secara de jure berhasil, yaitu pada tahun 1921 pemerintah menyatakan perempuan memiliki hak dipilih di Minahassa Raad. Namun, kebudayaan kolonialisme patriarki masih melekat dalam diri masyarakat sebagian besar, hingga sampai tahun 1930an-pun di Minahasa-Raad misalnya belum ada perempuan yang terpilih sebagai anggota walau perempuan sudah memiliki hak pilih dan dipilih sepenuhnya dalam artian terlibat langsung dalam politik pemerintahan dalam mengambil keputusan publik.

KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap data yang sudah ada di bahas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini, yaitu :

1. Menurut pemikiran Maria Walanda Maramis sebagai tokoh pejuang emansipasi perempuan, pendidikan merupakan hal yang penting bagi perempuan agar pemikiran perempuan dapat berkembang bahwa penting bagi perempuan untuk mendapatkan hak politik yaitu memilih dan dipilih karna perempuan bukan hanya perhiasan rumah tangga sehingga perempuan pantas untuk mendapatkan hak tersebut, sebab hak tersebut merupakan wujud kebebasan bagi perempuan. Maria Walanda Maramis juga sadar bahwa kaum perempuan harus bangkit dari keterpurukannya dan sadar bahwa mereka juga berhak memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki. perempuan yang berada dalam ranah politik di Indonesia sering mendapatkan ketidakadilan karna berlakukanya budaya patriarki, kurangnya pendidikan perempuan, serta kurangnya pengetahuan perempuan mengenai politik, sehingga menjadi penghambat bagi perempuan untuk dapat masuk ke dalam ranah politik pemerintahan.
2. Peran Maria Walanda Maramis dalam memperjuangkan hak perempuan yang mempengaruhi perkembangan sosial politik di wilayah Sulawesi Utara, antara lain:
   a. Maria Walanda mendirikan organisasi Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya (PIKAT) sebagai alat untuk pergerakan dalam memperjuangkan hak perempuan di Sulawesi Utara.

b. Maria Walanda mendirikan "huishoud-school" dan "Vakschool" yaitu sekolah khusus untuk perempuan dan anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan. Berdirinya sekolah ini tentunya di pelopori oleh organisasi PIKAT dan di bantu juga oleh teman-teman sesama kaumnya.
c. Maria Walanda menuliskan gagasannya lewat surat kabar, yang berisikan protesnya kepada pemerintah Minahasa dan juga bahkan menulis surat untuk pemerintah di Batavia (Jakarta), terhadap perempuan yang tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Pemikiran serta gerakan yang Maria Walanda lakukan di anggap pemikirannya mengarah pada feminisme liberal, dimana feminisme ini menekankan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan sama dan mempunyai hak yang sama dan juga harus mempunyai kesempatan yang sama. Feminisme ini juga mengarah pada persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh haknya.

SITASI DAN DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Rifa'i. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Press Uin Sunan Kalijaga.

Amin, Saidul. (2015). *Filsafat Feminisme (Studi Krisis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di dunia barat dan Islam)*. Pekanbaru: Asa Riau.

Amini, Mutia. (2021). *Sejarah Organisasi perempuan Indonesia (1928-1998)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Aliyah, Ida Hidayatul. Dkk. (2018). *Feminisme Indonesia dalam Lintasan Sejarah*. Jurnal Pembangun Sosial Vol. 1. Jawa: Temali.

Atmosiswartoputra, Mulyono. (2018). *Perempuan-Perempuan Pengukir Sejarah*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Batubara, Ulfah Nury. Dkk. (2021). *Liberalisme John Locke dan Pengaruhnya dalam Tatanan Kehidupan*. Jurnal Education and Development. Vol. 9 No.4

Dhiyaa Thurfah ilaa. (2021). *Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi*. Jurnal Filsafat Indonesia. Vol. 4. Jakarta: Universitas Indonesia.

Hanum, Farida. (2018). *Kajian dan Dinamika Gender*. Malang: Intrans Publishing.

Hasriyani Mahmud. (2014). Feminisme dalam Islam (Telaah Pemikiran Murtadha Muthahari). Skripsi Filsafat politik. Jawa Tengah: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hidayat, rahmad. (2020). *Maskulinisme dalam Konstruksi Ilmu*. Yogyakarta: Gagjah Mada University Press.

Ivan, R.B. Kaunang. (2017). *Jangan Lupakan PIKAT Anak Bungsuku*. Manado Sulawesi Utara: Aseni.

Lakawa, Septemmy E. (2018). *Perempuan, Dapur dan Teologi Feminis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Budiardjo, Miriam. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Prima Grafika.

Merlin Brenda Angeline Lumintang. (2021). A CROSS-BOUNDRY MISSIONARY: Menuju Sebuah Historiografi Feminis Missional Berdasarkan Pembacaan ulang Narasi Maria Walanda Maramis.

Mosse, Cleves Mosse. (2018). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muslimah, N. D., Suyitno, S., &Purwadi, P. (2019). Perjuangan Tokoh Perempuan Jawa Dalam Novel the Choronicle of Kartini Karya Wiwid Prasetyo (Kajian Feminis dan Nilai Pendidikan Karakter). Basastra: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajaran, 7(1), 125. https://doi.org/10.20961/basatra.v7i1.35510

Rokhmansyah, Alfian. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca.

Sugiano. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suwastini, Ni Komang Arie. (2013). *Perkembangan Feminisme Barat dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme* : Sebuah Tinjauan Teoritis. Vol. 2 No. 1

Talumewo, Bodewyn Grey. (2015). Perkembangan pers Minahasa pada masa kolonial tahun 1869-1942. Jurnal Skripsi S.S., Universitas Sam Ratulangi.

Pinontoan, Denni H.R. (2022). *Perempuan Minahasa Melawan Kolonialisme*. Tomohon: Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur.

Yusuf, Sarana. (2019). Perempuan dalam Ranah Politik di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Musdah Mulia dan Khofifah Indar Parawansa). Skripsi Ilmu Politik. Palembang: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Internet :

Aris, (2021). Ideologi: Pengertian, Fungsi, Sejarah dan Jenisnya. (https://www.gramedia.com/literasi/ideologi/, diakses 7 February 2024)

Kasenda, Peter, (2015). Maria Walanda Maramis dan historiografi Indonesia. (https://www.scribd.com/doc/287307613/Maria-Walanda-Maramis-Dan-Historiografi-Indonesia, diakses 5 Desember 2023).

William, Ciputra. (2022). Biografi Maria Walanda Maramis, Pahlawan Nasional Perempuan Kebanggaan Masyarakat Minahasa.

(https://regional.kompas.com/read/2022/03/01/143000878/biografi-maria-walanda-maramis-pahlawan-nasionalperempuankebanggaan.-page2 , diakses 7 February 2024)